



BAGIAN IV

TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

TANTANGAN
GLOBAL

TANTANGAN
DOMESTIK

1
Pelonggaran Kebijakan
Moneter-Makroprudensial
Secara Berhati-hati

2
Sinergi Kebijakan
Moneter-Fiskal Mendorong
Pertumbuhan

3
Percepatan Reformasi
Struktural

BAURAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Perkiraan Ekonomi Indonesia

2016

Inflasi $4 \pm 1\%$

Pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,6%

Defisit transaksi berjalan sedikit meningkat, namun tetap aman dan mempunyai struktur yang lebih sehat



Prospek Jangka Menengah

2020

Inflasi $3,5 \pm 1\%$

Pertumbuhan Ekonomi 6,3 - 6,8%

Defisit transaksi berjalan dibawah batas aman 3% dari PDB dengan struktur yang lebih sehat

BAGIAN IV

TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan berjalan gradual, sementara Eropa dan Jepang diperkirakan tetap menerapkan kebijakan *Quantitative Easing* (QE) sehingga divergensi kebijakan moneter mulai menyempit. Namun demikian, meski divergensi kebijakan moneter di negara maju mulai berkurang, kinerja perekonomian Tiongkok yang belum pulih dapat memicu sentimen negatif investor terhadap negara *emerging markets*. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Tantangan global lainnya mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Dalam kaitan ini, peluang Indonesia menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya.

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Tantangan struktural yang pertama adalah pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air sebagai faktor input utama yang diperlukan dalam proses transformasi menuju industrialisasi. Di sektor pangan, jumlah dan kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas dan teknologi yang mencukupi. Di sisi lain, permintaan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras akibat minimnya diversifikasi pangan. Di sektor energi,

ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan energi masih terus berlangsung. Di sisi produksi, berbagai kendala pembangunan infrastruktur energi menyebabkan ketidakmampuan produksi energi domestik untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Di sisi permintaan, minimnya pemanfaatan bahan bakar alternatif belum mampu menggeser penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan. Tantangan struktural kedua adalah tantangan memperkuat daya saing industri, maritim, dan pariwisata. *Terkait daya saing industri*, sektor industri di Indonesia masih berbasis komoditas ekstraktif dan yang bernilai tambah rendah. Di samping itu, keunggulan komparatif Indonesia terus mengalami penurunan terutama pada sektor dengan muatan teknologi menengah dan tinggi. Untuk itu, diperlukan strategi untuk memperkuat daya saing investasi guna menjadi basis produksi dalam memasok dalam rantai nilai global. *Terkait sektor maritim*, Indonesia dihadapkan pada tantangan kedaulatan wilayah, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi maritim. Di *sektor pariwisata*, tantangan utama pengembangan sektor ini bersumber dari terbatasnya infrastruktur yang pada gilirannya menghambat akses dan waktu jelajah wisatawan. Tantangan struktural ketiga adalah tantangan untuk memperkuat daya dukung pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan dan mendorong aliran masuk modal asing dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Tantangan struktural keempat adalah tantangan untuk memperluas tingkat partisipasi ekonomi masyarakat dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi.

Empat tantangan permasalahan struktural domestik tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan modal dasar pembangunan khususnya yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Berdasarkan pendekatan *growth diagnostic*, tantangan utama dalam perekonomian di hampir seluruh wilayah Indonesia bersumber dari permasalahan infrastruktur listrik, konektivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Listrik sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi belum dapat terpenuhi dengan baik terutama di luar Jawa. Sementara itu, belum

terintegrasinya infrastruktur terkait konektivitas menjadi hambatan dalam upaya menurunkan biaya logistik pada rantai nilai domestik, memperkuat integrasi internal, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari sisi kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan tenaga kerja yang mayoritas merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah belum kompatibel dengan upaya penguatan struktur ekonomi pada sektor teknologi menengah-tinggi. Di sisi iklim usaha, meski sudah jauh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, perbaikan iklim usaha perlu terus ditingkatkan antara lain melalui kemudahan terkait ijin investasi, mekanisme perpajakan, penyederhanaan birokrasi, dan perbaikan manajemen pemerintah. Di sisi iptek, belum optimalnya dukungan iptek dalam meningkatkan daya saing sektor produksi dan jasa merupakan permasalahan yang harus terus dicermati

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Di sisi moneter, Bank Indonesia akan secara konsisten dan berhati-hati mengarahkan kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), dan nilai tukar untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasarannya, mengelola defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat, dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang telah tercipta. Dalam kaitan tersebut, kebijakan suku bunga ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi, permintaan domestik, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya guna mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi dan defisit transaksi berjalan yang sehat dengan tetap mendukung momentum pertumbuhan yang sedang berjalan. Kebijakan GWM akan ditetapkan secara berhati-hati untuk mendukung kecukupan likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan nilai tukar tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan nilai fundamental. Upaya menjaga stabilitas rupiah ini sangat penting untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan sehingga akan memperkuat kinerja perekonomian secara

keseluruhan. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan melakukan penguatan operasi moneter baik rupiah maupun valas. Berbagai kebijakan tersebut juga akan terus diperkuat Bank Indonesia antara lain melalui pengelolaan lalu lintas devisa yang berhati-hati dan penguatan jaring pengaman keuangan internasional melalui kerja sama dengan berbagai otoritas pemangku kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Bank Indonesia juga terus mendorong pendalaman pasar keuangan dan perluasan akses keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan, efisiensi perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam upaya melanjutkan pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia antara lain mendorong penggunaan *General Master Repurchase Agreement* (GMRA) dan melanjutkan pengembangan instrumen pasar uang rupiah dan valas. Dalam konteks akses keuangan, Bank Indonesia akan menempuh kebijakan perluasan akses yang fokus pada pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD). Sementara itu, arah kebijakan pengembangan UMKM akan tetap fokus untuk mendukung tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dari sisi *supply* dan menyeimbangkan fungsi intermediasi perbankan. Pesatnya perkembangan sistem pembayaran diimbangi Bank Indonesia dengan menetapkan misi mengatur dan menjaga sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar. Seiring dengan berkembangnya peran pasar modal, Bank Indonesia turut menjaga keamanan dan kelancaraan aktivitas dan penyelesaian transaksi dalam pasar tersebut. Agar kebutuhan uang rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan berkualitas di seluruh Indonesia tercapai, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, dan industri untuk memperkuat infrastruktur pengolahan uang rupiah. Sementara itu, Pemerintah akan terus memperkuat stimulus fiskal untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang tercipta serta meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus mempercepat reformasi struktural untuk mendukung terciptanya modal dasar pembangunan yang kuat berupa infrastruktur yang berkualitas dan merata, sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi,

iklim investasi yang kondusif, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modal dasar pembangunan tersebut akan dimanfaatkan untuk menopang penguatan ketahanan pangan, energi, dan air, mendorong daya saing industri, maritim dan pariwisata, memperluas dan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang, serta penciptaan ekonomi inklusif. Dengan berbagai penguatan tersebut, struktur ekonomi Indonesia akan lebih terdiversifikasi sehingga lebih kokoh dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prospek perekonomian Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan sedikit membaik di tengah perekonomian global yang tumbuh terbatas. Meskipun harga komoditas global diperkirakan masih menurun, namun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 3,4% di atas tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2015 menjadi sekitar 5,2-5,6% pada tahun 2016. Pertumbuhan ini masih disokong oleh permintaan domestik dan investasi yang diperkirakan meningkat. Secara sektoral, sektor industri pengolahan diperkirakan masih menjadi penyokong utama perekonomian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi. Ketiga sektor tersebut diperkirakan masih menjadi unggulan, terutama sektor konstruksi sejalan pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Perekonomian daerah juga menunjukkan prospek yang membaik secara agregat pada tahun 2016, terutama perekonomian wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sejalan dengan membaiknya aktivitas perekonomian, defisit transaksi berjalan tahun 2016 diperkirakan sedikit meningkat, namun masih di bawah batas aman 3% dari PDB. Di sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial (TMF) diperkirakan akan mengalami peningkatan surplus. Secara keseluruhan, kinerja sektor eksternal NPI pada tahun 2016 diperkirakan akan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, inflasi diperkirakan masih terkendali sesuai dengan target sebesar $4\pm 1\%$ pada tahun 2016. Tekanan inflasi inti diperkirakan moderat dan tetap terkendali, sedangkan inflasi kelompok *administered prices* diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Inflasi kelompok *volatile food* diperkirakan sedikit meningkat sejalan dengan dampak El Nino.

Stabilitas Sistem Keuangan diperkirakan tetap terkendali didukung dengan terjaganya ketahanan perbankan dan membaiknya kinerja pasar keuangan. Prospek ekonomi ke depan yang membaik diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit masing-masing menjadi sebesar 13-15% dan 12-14%.

Perekonomian Indonesia jangka menengah akan semakin berkualitas ditopang oleh konsistensi kebijakan dalam mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta reformasi struktural. Sejalan dengan implementasi reformasi struktural yang ditempuh, perekonomian domestik ke depan diperkirakan akan semakin kuat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap meningkat mencapai 6,3-6,8% pada tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh membaiknya perekonomian global, keberhasilan reformasi struktural yang terlihat dari pembangunan infrastruktur dan kemudahan proses berinvestasi, serta peningkatan investasi di Indonesia. Konsumsi rumah tangga diperkirakan semakin kuat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk kelas menengah dan membaiknya perlindungan sosial. Reformasi struktural dalam bentuk pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan investasi langsung dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Belanja modal Pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur akan terbuka lebar seiring dengan penurunan subsidi. Defisit transaksi berjalan diperkirakan membaik seiring dengan meningkatnya daya saing produk Indonesia. Neraca TMF juga diperkirakan membaik sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, kinerja NPI menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dari sisi regional, peningkatan alokasi transfer ke daerah akan memperkuat perekonomian daerah dan mendukung pemerataan pembangunan di daerah. Sejalan dengan peningkatan kapasitas perekonomian domestik sebagai dampak dari konsistensi implementasi reformasi struktural serta dan konsistensi Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas makroekonomi, inflasi akan tetap terjaga dalam kisaran sasaran $3,5\pm 1\%$ dalam jangka menengah. Konsistensi implementasi reformasi struktural merupakan kunci bagi pencapaian kinerja positif prospek perekonomian domestik jangka menengah tersebut.



Keterangan gambar:

Upaya mengeksplorasi wilayah baru akan selalu menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, tantangan tersebut akan dapat diatasi dengan strategi yang tepat disertai langkah antisipasi yang memperhitungkan segala kemungkinan.



Bab 15

Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan

Perekonomian Indonesia masih akan menghadapi berbagai tantangan. Di sisi eksternal, tantangan utama bersumber dari risiko pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan penurunan harga komoditas. Di sisi domestik, tantangan struktural terkait: (i) ketahanan pangan, energi, dan air; (ii) daya saing industri, maritim, dan pariwisata; (iii) pembiayaan jangka panjang; dan (iv) ekonomi inklusif. Di samping itu, modal dasar pembangunan serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu diperkuat. Untuk itu, bauran kebijakan diarahkan untuk mengawal stabilitas, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural. Ke depan, struktur ekonomi Indonesia diharapkan lebih terdiversifikasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Momentum pertumbuhan ekonomi domestik ke depan akan menghadapi sejumlah tantangan baik global maupun domestik. Dari sisi global, risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun seiring dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter negara maju. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia ke depan berisiko berjalan lambat dan diiringi oleh berlanjutnya tren penurunan komoditas global. Meskipun risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun, terdapat risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang bersumber dari kondisi perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Dengan berbagai kondisi tersebut, aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia, akan membaik meskipun cenderung moderat dan mata uang dolar AS masih berada dalam tren penguatan. Dalam skala regional, perekonomian kawasan yang semakin terintegrasi serta besarnya peran Tiongkok dalam perekonomian negara berkembang lainnya, menghadapi risiko terkena dampak rambatan dari proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, baik dari jalur pelemahan harga komoditas, jalur perdagangan, maupun melalui jalur finansial.

Dari sisi domestik, penguatan perekonomian nasional masih menghadapi sejumlah permasalahan struktural. Pertama, tantangan mencapai ketahanan pangan, energi, dan air sebagai input faktor utama dalam mendukung proses transformasi menuju industrialisasi. Kedua, masih tertinggalnya Indonesia dalam rantai nilai global dibandingkan dengan negara pesaing di kawasan, dimana tidak berimbangnya struktur industri dan rendahnya produktivitas menyebabkan daya saing produk industri Indonesia relatif lemah. Ketiga, penguatan basis pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk mendukung investasi sebagai fondasi penggerak perekonomian. Keempat, menciptakan pemerataan bagi masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menghadapi sejumlah tantangan tersebut, sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat. Bauran kebijakan di tingkat nasional diarahkan untuk mengawal stabilitas makroekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih diversifikasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah panjang. Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati. Di sisi Pemerintah,

kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Di samping itu, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mempercepat reformasi struktural untuk mendukung terciptanya modal dasar pembangunan yang kuat berupa infrastruktur yang berkualitas dan merata, sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi, iklim investasi yang kondusif, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modal dasar pembangunan tersebut akan dimanfaatkan untuk: (i) menopang penguatan ketahanan pangan, energi, dan air; (ii) mendorong daya saing industri, maritim, dan pariwisata; (iii) memperluas dan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang; dan (iv) menciptakan ekonomi inklusif.

15.1. TANTANGAN PEREKONOMIAN

Tantangan Perekonomian Global

Ke depan, perekonomian global akan membaik namun masih menyimpan berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Terdapat beberapa tantangan yang mengiringi ketidakpastian ekonomi global, terutama risiko belum solidnya prospek pertumbuhan ekonomi global dan masih melemahnya harga komoditas. Meskipun prospek pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, masih terdapat risiko pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini antara lain terkait dengan masih belum cukup kuatnya prospek perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang merupakan motor perekonomian global. Di samping itu, kondisi perekonomian Tiongkok yang belum kuat juga mengandung risiko lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global ke depan. Di sisi pasar keuangan global, meski ketidakpastian di pasar keuangan akan membaik namun kondisi perekonomian Tiongkok yang belum stabil dapat memicu kembali peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun terkait dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter di negara maju, namun risiko yang bersumber dari masih lemahnya perekonomian Tiongkok tetap harus diwaspadai. Menyempitnya divergensi kebijakan moneter terkait dengan normalisasi kebijakan moneter AS yang diperkirakan bersifat gradual di tengah berlanjutnya kebijakan *Quantitative Easing* (QE) Eropa dan Jepang. Normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan masih akan berlanjut pada 2016 namun dengan kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) yang moderat seiring dengan kondisi perekonomian AS yang belum cukup solid. Di sisi lain, kebijakan QE di Eropa oleh *European Central Bank* (ECB) dipastikan masih akan terus berlanjut hingga triwulan

I 2017 dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Namun demikian, risiko perekonomian Tiongkok berpotensi menjadi sumber pemicu pembalikan sentimen investor terhadap negara *emerging markets* yang berdampak pada peningkatan *risk premium* dan volatilitas aliran modal asing. Dengan demikian, nilai tukar dolar AS diperkirakan akan menguat pada tahun 2016. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap neraca transaksi modal dan finansial, stabilitas makroekonomi, serta stabilitas sistem keuangan.

Penurunan harga komoditas diperkirakan masih berlanjut, sejalan dengan masih melambatnya perekonomian Tiongkok. Proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, sebagai konsumen komoditas terbesar di dunia, dalam jangka pendek masih akan diikuti oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik sehingga berpengaruh terhadap turunnya permintaan dan harga komoditas global. Pada saat yang sama, harga minyak dunia dalam jangka pendek juga diperkirakan masih lemah sejalan dengan belum dilakukannya pengurangan produksi secara signifikan oleh pemasok minyak baik OPEC maupun non-OPEC. Di samping itu, pelemahan harga minyak dan harga komoditas juga didorong oleh perilaku investor yang melakukan pergeseran investasi dari komoditas ke aset dolar AS. Hal ini pada gilirannya berpotensi memberikan tekanan pada perbaikan kinerja transaksi berjalan.

Terkait dengan risiko terhadap penguatan nilai tukar dolar AS, peran dana asing yang besar pada struktur pembiayaan korporasi menyiratkan risiko lain. Utang luar negeri korporasi berada dalam tren meningkat sejak 2010, didorong mudahnya sumber dana global seiring kebijakan pelonggaran moneter negara maju. Dibandingkan dengan negara lain, ketergantungan korporasi di Indonesia terhadap utang luar negeri juga cukup besar. Ketergantungan korporasi pada utang luar negeri menimbulkan kerentanan dalam perekonomian nasional ketika kesadaran untuk melakukan kegiatan lindung nilai terhadap kewajiban valuta asing baru menyentuh sebagian kecil korporasi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko bagi korporasi saat terjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menciptakan tantangan dan peluang ke depan yang semakin beragam. Peluang Indonesia cukup besar untuk menjadi basis produksi untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global. Dengan dihapuskannya tarif (perdagangan bebas) maka total potensi pasar akan membesar dan produk domestik diharapkan mampu bersaing dengan produk dari negara pesaing. Akan tetapi, jika peluang ini tidak dipersiapkan dengan baik

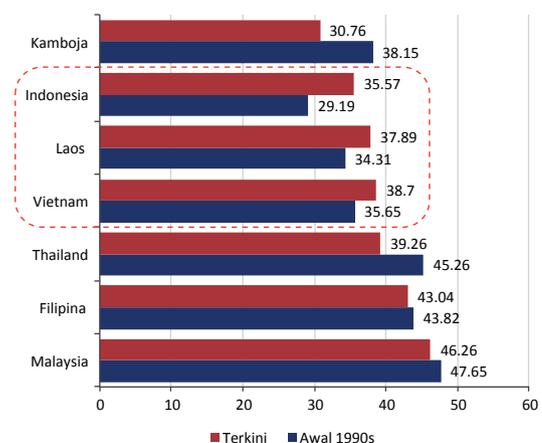
dikhawatirkan bahwa Indonesia hanya akan menjadi target pasar bagi produk barang dan jasa dari negara MEA lainnya.

Tantangan Perekonomian Domestik

Dari sisi domestik, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan struktural yang menghambat pencapaian pertumbuhan potensialnya. Permasalahan tersebut antara lain meliputi rentannya kecukupan pangan, energi, dan air, tidak berimbangnya struktur industri dan rendahnya produktivitas yang menyebabkan ketertinggalan dari rantai nilai global, masih dangkalnya struktur pasar keuangan domestik, serta kesenjangan ekonomi yang meningkat (Grafik 15.1).

Dari sejumlah tantangan struktural dimaksud, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, terdapat empat pilar yang menjadi prioritas untuk dibenahi (Gambar 15.1). Empat pilar prioritas pembangunan tersebut terdiri dari (i) ketahanan pangan, energi, dan air, (ii) daya saing maritim, industri, dan pariwisata, (iii) pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, dan (iv) ekonomi inklusif. Upaya pembenahan yang ditempuh memerlukan dukungan sejumlah modal dasar pembangunan, berupa jaringan infrastruktur yang berkualitas dan menyeluruh, tersedianya SDM yang berkualitas, iklim investasi yang kondusif, serta peranan IPTEK yang signifikan. Disamping itu, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Grafik 15.1. Indeks Gini Negara ASEAN

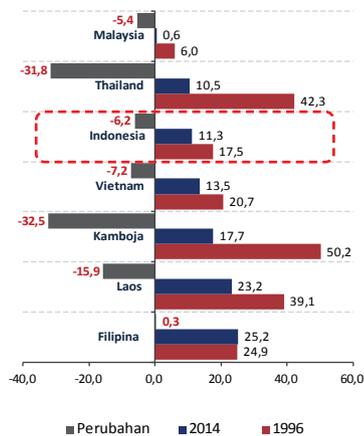


Sumber: World Bank

juga menjadi prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, prioritas kebijakan difokuskan untuk menciptakan struktur ekonomi domestik yang kuat, sehingga tercipta perekonomian yang berkelanjutan dan seimbang. Diversifikasi ekonomi dan transformasi struktural memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal. Proses transformasi perekonomian harus diperhatikan dengan seksama agar berjalan sesuai tahapannya. Transformasi dilakukan dengan memperhatikan faktor pendukung ekonomi domestik, antara lain konsumsi domestik dan pasar tenaga kerja yang kuat, harga energi dan pangan yang rendah dan stabil, ketahanan air yang kuat, infrastruktur dan konektivitas yang menyeluruh, iklim investasi yang kondusif, perluasan integrasi dalam rantai perdagangan dunia, serta diversifikasi produk ekspor terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas primer. Di samping itu, kontribusi produktivitas yang masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara (Chen, 1997) perlu menjadi fokus perhatian dalam penyusunan kebijakan. Semakin kompleksnya tantangan struktural yang dihadapi serta tren melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik yang terjadi sejak tahun 2012 mendorong urgensi implementasi reformasi struktural. Percepatan reformasi struktural diharapkan tidak hanya mempercepat transisi Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi, namun juga menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas sehingga

Grafik 15.2. Tingkat Kemiskinan Negara-negara ASEAN



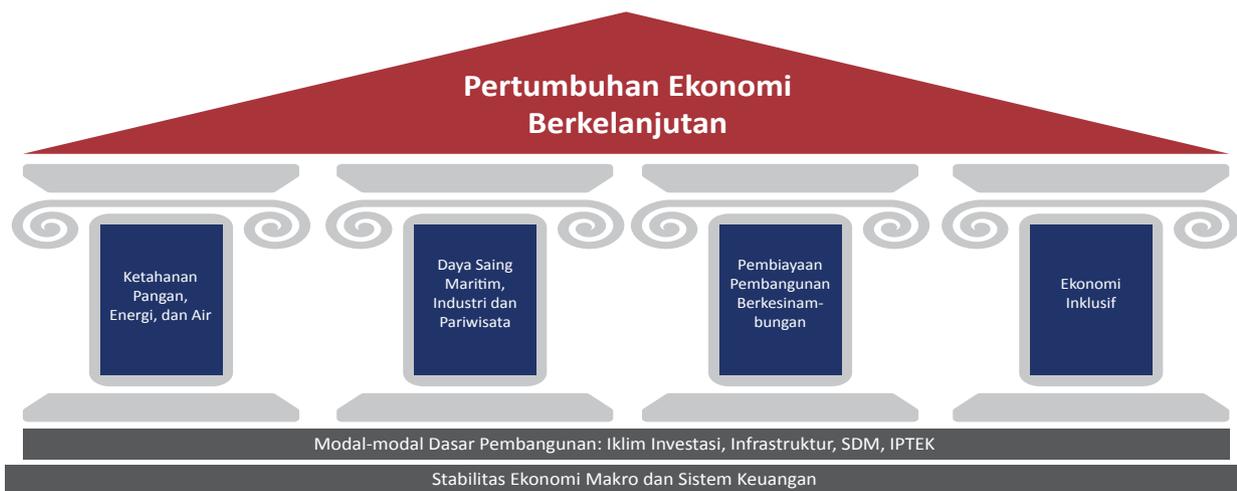
Sumber: World Bank

dapat semakin mendorong penurunan angka ketimpangan dan kemiskinan (Grafik 15.2).

Tantangan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Ketahanan pangan, energi, dan air sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan permasalahan mendasar yang perlu dibenahi. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya usia harapan hidup dan pendapatan, mendorong meningkatnya ketersediaan pangan, energi, dan air dengan harga terjangkau dan dalam jumlah cukup. Sebagai sektor yang menghasilkan input faktor produksi, ketersediaan serta kestabilan harga pangan, energi, dan air dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 15.1. Empat Pilar Tantangan Struktural



Tren harga pangan, energi, dan air yang terus meningkat dalam jangka menengah panjang, perubahan iklim dan demografi, peningkatan urbanisasi, alih fungsi lahan, serta perubahan pola konsumsi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam mendorong produksi pangan, energi, dan air nasional.

Saat ini, ketahanan pangan Indonesia relatif masih rendah, terutama dari sisi kualitas dan daya beli masyarakat.¹ Dari sisi produksi, jumlah dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, terutama terkendala oleh keterbatasan input faktor produksi, diantaranya terkait dengan berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas pertanian dan teknologi. Dalam kurun waktu 2006-2013, hanya terdapat 47.000 ha pertahun pembukaan lahan baru, sementara laju konversi lahan menjadi kawasan pemukiman dan industri mencapai 100.000 ha pertahun (Bappenas, 2015). Di sisi lain, konsumsi pangan yang terus meningkat belum diimbangi dengan peningkatan produksi pangan.

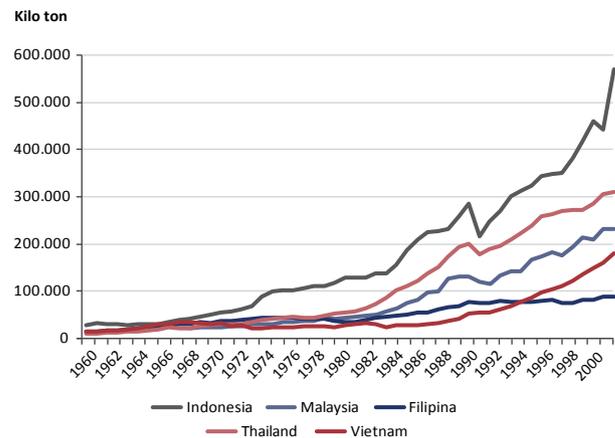
Dari sisi energi, meski memiliki potensi sumber daya energi yang besar, Indonesia menghadapi risiko ketahanan energi yang cukup rentan. Terus meningkatnya kebutuhan bahan bakar belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produksi energi domestik. Beberapa masalah yang menghambat produksi energi domestik terutama adalah kendala pembangunan infrastruktur berupa pengembangan menara dan pembangkit listrik serta terbatasnya pengembangan diversifikasi energi baru dan terbarukan.² Di sisi lain, minimnya pemanfaatan bahan bakar alternatif, seperti *biofuel*, belum mampu menggeser ketergantungan yang tinggi pada sumber daya energi fosil.³ Hal ini perlu diwaspadai, karena disamping berdampak pada semakin langkanya ketersediaan energi fosil, juga berakibat pada kerusakan lingkungan dan pemanasan global (Grafik 15.3). Meskipun Pemerintah telah melakukan reformasi energi antara lain dengan mengurangi subsidi BBM, tingginya impor migas dan terbatasnya cadangan minyak Indonesia masih membebani defisit neraca pembayaran (Grafik 15.4). Apabila tidak dikelola dengan baik, defisit neraca

1 Berdasarkan *global food security index*.

2 EIA (2015) memperkirakan konsumsi energi dunia akan terus meningkat dari 97,1 quadrillion Btu (2013) meningkat menjadi 100,8 quadrillion Btu (2020).

3 Produksi *biofuel* mencapai 4,4% dari total produksi energi primer setelah minyak mentah, batu bara dan biomasa. Sedangkan konsumsi *biofuel* digunakan untuk sektor transportasi dengan pangsa mencapai 22% setelah BBM yang mencapai 78%.

Grafik 15.3. Emisi CO2 Negara ASEAN

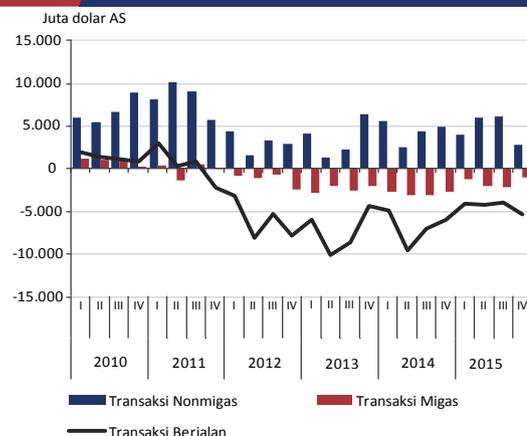


Sumber: World Bank

pembayaran dalam jangka menengah-panjang berpotensi meningkatkan kerentanan perekonomian.⁴

Ketersediaan jumlah dan kualitas air merupakan hal penting bagi kesejahteraan dan kesehatan manusia serta lingkungan. Penguatan ketahanan airnasional merupakan tantangan yang dihadapi terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi pangan, dan sumber

Grafik 15.4. Neraca Pembayaran Indonesia



4 Emisi Indonesia mencapai 523 juta ton dan menempati posisi 9 besar negara penghasil CO2 terbesar di dunia (World Bank, Juni 2015), dan diprediksi meningkat dari 116 juta ton menjadi 270 juta ton pada tahun 2018. Dari 270 juta ton gas CO2 tersebut 84,5% berasal dari pembakaran batu bara. Tahun 2015, pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif antara lain: dana desa, pembangunan kapal dan pelabuhan, kartu keluarga sejahtera dan keluarga harapan, subsidi pertanian, dana alokasi khusus, kartu Indonesia sehat, armada perbatasan, sistem informasi dan logistik kelautan, proyek infrastruktur berupa waduk, air minum, jalan dan jalan tol, dan kartu Indonesia pintar.

energi. Rentannya ketahanan air Indonesia terutama dipengaruhi oleh relatif rendahnya kapasitas pengelolaan sumber daya air serta adanya faktor yang memengaruhi sumber daya air seperti alih fungsi lahan, infrastruktur SDA yang relatif terbatas, gangguan daerah aliran sungai, serta pencemaran air.

Pemerintah telah menyusun sasaran dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air, namun realisasinya masih terbatas.⁵ Sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air ke depan, Pemerintah menyadari perlunya dilakukan pembenahan struktur dan sistem sektor pertanian, energi, dan pengelolaan air. Terkait sektor pertanian, pembenahan dilakukan antara lain melalui reformasi kebijakan, pengembangan dan perbaikan infrastruktur, produksi dan pasca panen, serta tata usaha pasar. Di sektor energi, pembenahan kebijakan energi yang akan ditempuh antara lain berupa pengembangan dan pemanfaatan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, pengelolaan minyak dan gas bumi termasuk pengalihan subsidi BBM, pemenuhan ketenagalistrikan, serta peningkatan nilai tambah produk tambang, seperti batu bara. Sedangkan ketahanan air, Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ke-6 yang terkait dengan penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Paket kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2015 telah memberikan sinyal positif bagi arah pembaharuan pembangunan nasional. Namun, evaluasi untuk menilai keberhasilannya saat ini belum dapat dilakukan. Di sektor pertanian, reformasi kebijakan akan mendorong semakin efisiennya biaya tenaga kerja dan biaya produksi, yang diiringi juga dengan peningkatan produktivitas, sehingga mampu meningkatkan produksi hingga 10%-20%. Hal ini pada gilirannya dapat menurunkan ketergantungan impor pangan sehingga harga pangan lebih stabil dan pendapatan petani meningkat.⁶ Di sektor energi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga mikro hidro, dan tenaga biomassa mampu meningkatkan ketersediaan energi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi dan bauran energi primer. Sementara, eksplorasi cadangan migas dan pengoperasian kilang di Cilacap mampu mengurangi impor BBM dan meningkatkan ketahanan pasokan BBM. Sementara itu, ketahanan air meliputi hak rakyat

5 Terdapat 4 arah pokok kebijakan pangan 2015-2019, yaitu: (i) peningkatan produksi, (ii) stabilisasi harga dan pasokan, (iii) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, dan (iv) penanganan gangguan ketahanan pangan.

6 Berdampak pada penghematan devisa hingga Rp52 triliun.

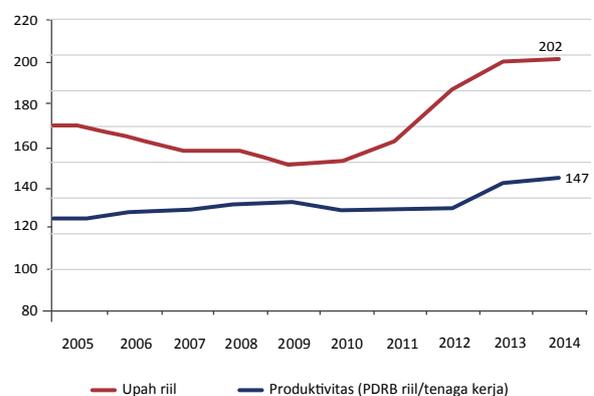
atas air, kelestarian lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian air, serta peran negara sebagai prioritas utama pengelolaan air.

Tantangan Daya Saing Industri, Maritim, dan Pariwisata

Ke depan, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural terkait daya saing di bidang industri, maritim, dan pariwisata. Strategi perekonomian Indonesia tidak dapat terus mengandalkan komoditas ekstraktif, namun harus lebih bertumpu pada keunggulan daya saing industri yang bernilai tambah tinggi. Meski demikian, strategi tersebut menghadapi tantangan terutama dari sisi produktivitas, diversifikasi, muatan teknologi, dan integrasi ekonomi global. Untuk itu, perlu penguatan daya saing non-upah melalui reformasi struktural yang berorientasi pada produktivitas. Hal ini penting mengingat bahwa dalam satu dekade terakhir, produktivitas industri domestik cenderung stagnan dan belum mengimbangi tekanan kenaikan upah (Grafik 15.5). Oleh karena itu, strategi pengembangan industri nasional, terutama industri padat karya, tidak dapat terus bergantung pada rezim upah murah. Sebagai kebijakan yang bersifat non-siklikal, upaya meningkatkan produktivitas tersebut tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tapi juga meningkatkan pertumbuhan potensial secara permanen.

Di sektor industri, pembangunan ekonomi menghadapi tantangan struktural yang mendasar, karena berbasis komoditas ekstraktif dengan nilai tambah rendah dan dapat merusak lingkungan, terutama bagi provinsi di kawasan luar Jawa. Penerapan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah mampu mendorong investasi di sektor hilirisasi SDA mineral, terutama kawasan di luar

Grafik 15.5. Perbandingan Upah Riil dan Produktivitas Industri Pengolahan (Indeks 2000=100)



Sumber: Kemenakertrans, BPS, diolah

Jawa.⁷ Namun hal ini perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan diversifikasi sektor ekonomi, agar tercipta lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan produktif. Pembangunan ekonomi di luar Jawa perlu didukung oleh proses *self discovery* pelaku usaha, yaitu proses inovasi yang ditandai dengan tumbuhnya industri baru.⁸ Mengingat proses inovasi tersebut membutuhkan biaya tinggi dan memiliki risiko kegagalan, maka perlu didukung ketersediaan modal dasar pembangunan yang efisien. Dalam hal ini, Jawa sudah lebih maju karena memiliki infrastruktur dan iklim usaha yang lebih baik. Sementara itu, reformasi struktural kawasan di luar Jawa untuk memperkuat integrasi internal, agar nusantara menjadi sebuah kesatuan zona produksi bagi dunia.

Tantangan lainnya adalah perlunya menjaga kesinambungan proses industrialisasi sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan transformasi ekonomi menjadi negara maju. Sebagai negara berkembang, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh investasi modal, sumber daya alam dan energi. Untuk itu, agar tidak terjebak dalam de-industrialisasi prematur, penting bagi Indonesia untuk *catch up* dengan ekonomi global melalui peningkatan kapabilitas teknologi yang didukung oleh tenaga kerja berkeahlian, perbaikan sistem inovasi dan *upgrading* dalam rantai nilai global. Disamping itu, untuk menjaga konsistensi kebijakan perbaikan daya saing industri, aktivitas industri manufaktur perlu diarahkan sebagai suatu kluster kegiatan yang didukung oleh kinerja sektor lainnya seperti jasa, perdagangan dan konektivitas logistik, energi, dan kualitas tenaga kerja.

Dari sisi muatan teknologi, keunggulan komparatif Indonesia terus mengalami penurunan, terutama pada sektor dengan muatan teknologi menengah dan tinggi. Penurunan daya saing ekspor Indonesia terutama pada sektor yang memiliki keterkaitan tinggi, seperti elektronik dan permesinan, dimana tingkat kecanggihan produk ekspor Indonesia relatif rendah dibandingkan negara pesaing di regional.⁹ Di sisi lain, jenis produk yang cenderung masih bertahan dalam keunggulan ekspor

7 Berdasarkan Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016).

8 Konsep *self-discovery* mengacu pada Hausmann, R. dan D. Rodrik (2002). "*Economic Development as Self-Discovery*". Pembangunan ekonomi membutuhkan proses *self-discovery*, dimana agen swasta melakukan inovasi yang berisiko untuk mencari insentif finansial. Dalam proses tersebut, terjadi realokasi sumber daya dari yang tidak mampu bertahan ke yang mampu tumbuh dengan lebih produktif, sehingga secara agregat ekonomi memperoleh keuntungan. Kebijakan publik diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung *self-discovery* tersebut.

9 Berdasarkan pemetaan *product space*.

Indonesia merupakan produk SDA dan olahannya. Hal ini perlu diwaspadai mengingat bahwa untuk menciptakan industri yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berstandar internasional diperlukan peningkatan daya saing pada sektor teknologi menengah dan tinggi. Untuk itu, dukungan kualitas tenaga kerja yang memadai juga memegang faktor kunci. Disamping itu, penguatan daya saing pada sektor-sektor tersebut juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan Indonesia dalam bertransisi menjadi negara maju (lihat Boks 15.1).

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk MEA, Indonesia perlu memperkuat daya tarik investasi untuk menjadi basis produksi yang memasok dalam rantai nilai global. Rendahnya daya saing Indonesia dalam rantai nilai global terlihat dari kemampuan memberikan nilai tambah setelah mengimpor bahan baku, untuk kemudian diekspor kembali ke berbagai negara, yang terbatas. Perbandingan karakteristik FDI di antara negara ASEAN menunjukkan bahwa investasi di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, namun lebih berorientasi domestik. Sementara itu, negara lain di kawasan dapat mengundang investasi yang lebih berkualitas untuk mendorong peningkatan ekspor dan menyerap tenaga kerja terampil. Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan daya tarik sebagai lokasi investasi untuk tujuan ekspor ke pasar dunia dan memanfaatkan integrasi dalam rantai nilai global guna memperluas pasar, mengadopsi kemajuan teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mendorong kemajuan industri kecil dan menengah. Permasalahan kualitas SDM hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, kajian Affandi dan Anugrah (2015) menunjukkan dampak peningkatan kualitas SDM sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹⁰

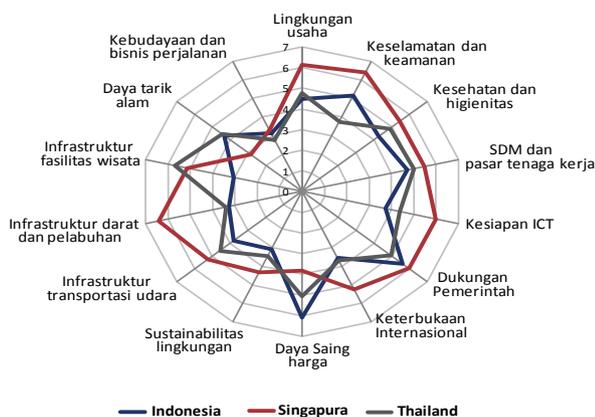
Sektor maritim menghadapi tantangan kedaulatan wilayah, optimalisasi pengelolaan SDA, konektivitas, dan pengembangan ekonomi maritim. Dari sisi kedaulatan wilayah, salah satu permasalahan yang dihadapi terkait kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga. Meskipun saat ini telah memiliki kesepakatan batas maritim dengan satu negara tetangga, yaitu Papua Nugini, Indonesia masih harus menyelesaikan perundingan dengan sembilan negara tetangga lainnya. Dari sisi pengelolaan SDA, potensi besar sektor perikanan tangkap dan budidaya belum dikelola secara optimal, sehingga skala ekspor Indonesia masih tertinggal

10 Selengkapnya lihat: Affandi dan Anugrah (2015), "*Strategi Pertumbuhan di Indonesia: Pendekatan Growth Diagnostic*", Bank Indonesia.

dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand.¹¹ Sementara itu, permasalahan konektivitas Indonesia berupa infrastruktur dasar yang kurang memadai menyebabkan rantai nilai domestik kurang efisien. Hal ini terjadi mengingat infrastruktur listrik, pelabuhan bongkar muat, konektivitas digital, dan sektor jasa pendukung tersedia lebih baik di wilayah Jawa dibandingkan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berbasis maritim.

Sektor pariwisata Indonesia masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang menghambat akses dan waktu jelajah, terutama untuk objek wisata yang memiliki kekuatan daya tarik keindahan alam. Indikator daya saing perjalanan dan pariwisata menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara.¹² Secara umum, Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dari sisi harga, daya tarik alam, dan dukungan pemerintah, namun memiliki kelemahan dari aspek infrastruktur dan lingkungan pendukung seperti kesehatan dan higienitas, kemajuan teknologi, fasilitas wisata, dan kapasitas modal manusia. Selain itu, faktor keselamatan dan keamanan, khususnya terkait terorisme, juga masih menjadi pertimbangan wisatawan, sehingga mengurangi potensi wisata nasional (Grafik 15.6). Hal ini perlu dicermati, karena selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa, pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja pertanian.

Grafik 15.6. Perbandingan Daya Saing Pariwisata dan Perjalanan



Sumber: *World Economic Forum*, 2015

11 Berdasarkan Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga triwulan III 2015 peningkatan perikanan tangkap dan budidaya masing-masing sebesar 5,05% dan 3,98% .

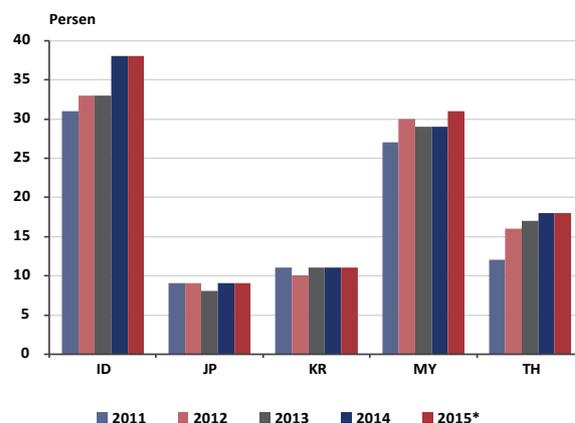
12 Berdasarkan *World Economic Forum* (2015); peringkat 1 adalah yang terbaik.

Tantangan Pembiayaan Pembangunan Berkesinambungan

Tantangan lain terkait dengan fundamental perekonomian Indonesia adalah terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan formal dalam pembangunan nasional. Sektor jasa keuangan Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan yang memiliki basis sumber dana jangka pendek, sehingga memiliki risiko terjadinya *mismatch*, sedangkan pemanfaatan pasar modal masih sangat terbatas. Upaya penguatan pembiayaan investasi jangka panjang saat ini masih terkendala oleh beberapa permasalahan struktural. Pertama, tingginya biaya modal sejalan dengan mahalnya struktur *liabilities* perbankan karena masih tingginya persepsi risiko terhadap sektor riil serta ketidakpastian. Kedua, cukup besarnya pangsa kepemilikan asing di SBN dan kontribusi asing dalam perdagangan saham sehingga seringkali menyebabkan tingginya volatilitas harga di pasar sekunder (Grafik 15.7). Ketiga, masih terbatasnya sumber pembiayaan jangka panjang dari pasar modal, bahkan relatif tertinggal dibanding kawasan, demikian pula kapasitas dan likuiditas pasar keuangan domestik (Grafik 15.8).

Tantangan lain bagi pembiayaan pembangunan nasional adalah pentingnya mendorong aliran masuk modal asing dalam bentuk penanaman langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*). Penanaman FDI pada industri berorientasi ekspor tidak hanya merupakan sumber pembiayaan yang penting, namun juga berpotensi meningkatkan daya saing industri dimaksud dalam rantai perdagangan internasional (Boks 15.2).¹³ Keterbatasan

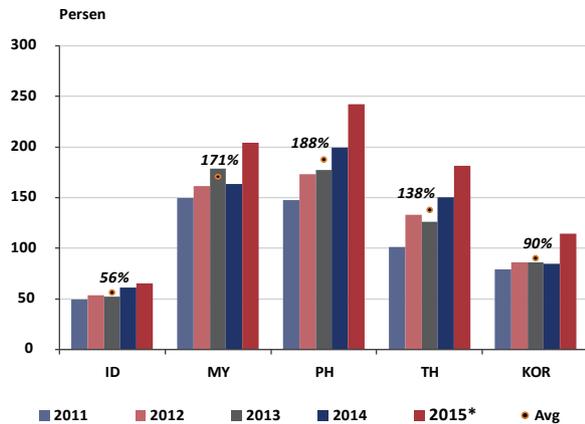
Grafik 15.7. Kepemilikan Asing di Obligasi Pemerintah



*) data 2015 per September 2015

13 Rata-rata rasio FDI terhadap PDB Indonesia (2004–2014) sebesar 1,8% lebih rendah dibandingkan negara *peer* kawasan seperti Vietnam (5,9%), Malaysia (3,2%), Thailand (3,0%), maupun Tiongkok (2,1%).

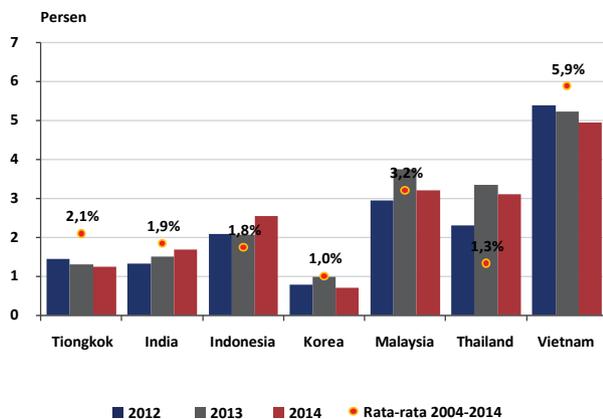
Grafik 15.8. Market Capitalization



*) data 2015 per September 2015

pembiayaan jangka panjang tampak dari pergerakan *basic balance* neraca pembayaran Indonesia yang sering mengalami defisit.¹⁴ Keterbatasan infrastruktur, dan kendala perijinan investasi yang cenderung lambat dan berbelit-belit menjadi salah satu permasalahan utama yang menghambat aliran FDI ke Indonesia, dimana rasio FDI terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga (Grafik 15.9).¹⁵

Grafik 15.9. Rasio FDI terhadap PDB



14 *Basic Balance* menunjukkan kemampuan pembiayaan transaksi berjalan dengan sumber dari pendanaan jangka panjang. *Basic Balance* merupakan penjumlahan dari transaksi berjalan, neto investasi langsung, dan neto investasi lainnya jangka panjang.

15 Kebijakan investasi saat ini mengacu pada UU No.25/2007 tentang penanaman modal. UU ini merevisi UU No. 11/1970 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 12/1970 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Pembaruan diarahkan terutama pada kemudahan dalam berinvestasi, perlakuan yang sama antara asing dan domestik, serta pemberian kepastian hukum.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, sebagian besar investasi terutama didominasi sektor manufaktur (Tabel 15.1), namun belum terfokus pada sektor industri yang berorientasi ekspor.

Tantangan Ekonomi Inklusif

Tantangan lainnya yang dihadapi perekonomian Indonesia berupa masih tingginya ketimpangan pembangunan serta ketidakmerataan masyarakat dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi mencapai 5,8% dalam lima tahun terakhir, masih belum mampu membawa Indonesia masuk dalam kelompok negara *upper middle income*. Meskipun kinerja ekonomi mampu menurunkan rasio penduduk miskin dan tingkat pengangguran, namun masih belum dirasakan secara merata tercermin dari rasio Gini yang terus meningkat terutama di KTI. Bank Dunia (2012) menyebutkan sebanyak 30 juta atau 40% penduduk Indonesia rentan masuk kelompok penduduk miskin, terutama bila terjadi *shock* harga pangan.¹⁶

Tabel 15.1. Pangsa Investasi Berdasarkan Sektor

	dalam Persen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Industri Pengolahan	36,1	42,5	46,7	45,3	34,6	26,0
Pertambangan dan Penggalian	13,8	17,8	9,5	13,2	13,5	10,9
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	17,4	13,9	15,8	10,4	8,6	8,3
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	2,1	1,3	6,3	10,1	17,3	32,3
Perdagangan Besar dan Eceran	17,9	12,9	6,5	5,2	8,6	10,7
Lembaga Perantara Keuangan	3,0	5,2	5,4	2,7	6,8	5,3
Lainnya	8,1	-0,3	3,9	4,3	2,3	4,3
Real Estate, Persewaan, dan Jasa Bisnis	0,2	3,0	4,3	4,6	5,9	2,5
Listrik, Gas, dan Air	1,5	2,1	1,5	1,9	1,1	-2,3
Perikanan	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	1,3
Konstruksi	-0,4	1,7	-0,4	1,8	0,6	-0,1
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Adm. Pemerintahan dan Pertahanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendidikan	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Hotel dan Restoran	0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
Jasa Kemasyarakatan, dsb.	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*) data hingga triwulan III-2015

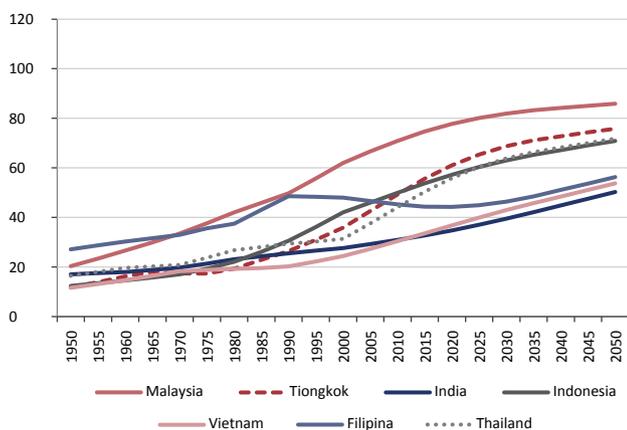
16 Sebanyak 14,3% penduduk pedesaan berada dibawah garis kemiskinan, lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan yang mencapai 8,4% (Vujanovic, 2015).

Ketimpangan pembangunan pedesaan-perkotaan mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan dan aglomerasi yang akhirnya menarik perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan (Grafik 15.10). Seiring dengan tingginya arus urbanisasi, diperkirakan 70% penduduk akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050 (United Nation, 2012). Untuk itu, perlu adanya dukungan kebijakan terutama dalam penyediaan infrastruktur dan iklim usaha yang mendukung penyediaan lapangan kerja dan lingkungan hidup yang layak. Minimnya infrastruktur berkualitas menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Grafik 15.11), sedangkan secara spasial juga terdapat kesenjangan akses masyarakat memperoleh kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, sanitasi, telekomunikasi, dan tempat tinggal, terutama pada KTI. Demikian pula pada sektor keuangan, dimana akses keuangan belum bersifat inklusif dan belum dirasakan secara merata oleh berbagai lapisan masyarakat, baik berdasarkan tingkat pendapatan maupun wilayah.

Tantangan Modal Dasar Pembangunan

Untuk memperkuat fundamental perekonomian, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural terkait modal dasar pembangunan, khususnya infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sisi infrastruktur, Indonesia perlu menjaga momentum reformasi struktural dengan memelihara kredibilitas, efektivitas, dan kecepatan implementasi kebijakan.¹⁷ Kredibilitas dalam jangka pendek dapat

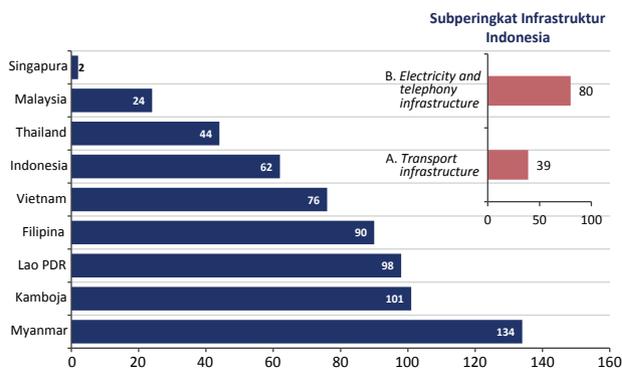
Grafik 15.10. Tingkat Urbanisasi Negara Asia



Sumber: United Nations

17 Kredibilitas berarti kesesuaian realisasi dengan rencana, sementara efektivitas adalah persentase pencapaian, dan kecepatan adalah lama pembangunan.

Grafik 15.11. Peringkat Infrastruktur ASEAN



Sumber: World Economic Forum 2013

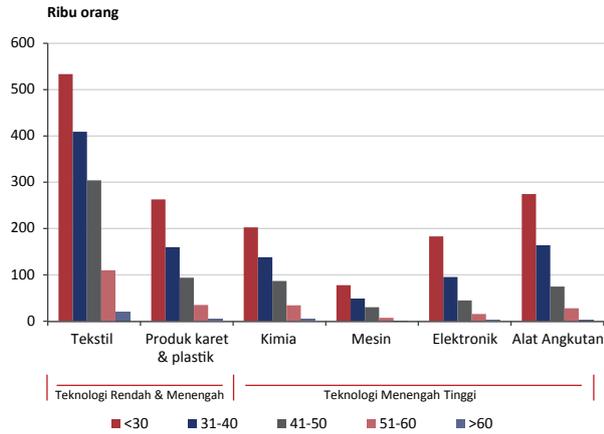
memengaruhi perilaku agen ekonomi melalui ekspektasi, sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Sedangkan efektivitas dan kecepatan dapat memengaruhi besarnya deviasi peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial.¹⁸ Untuk memperkuat efektivitas, reformasi struktural juga perlu memperhatikan prioritas pembangunan.

Berdasarkan pendekatan *growth diagnostic*, hambatan utama dalam perekonomian di hampir seluruh wilayah Indonesia bersumber dari permasalahan infrastruktur listrik, konektivitas, dan kualitas sumber daya manusia.¹⁹ Listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang cukup tinggi bagi industri di Jawa, serta kebutuhan rumah tangga dan industri yang belum terpenuhi di kawasan luar Jawa. Infrastruktur konektivitas, seperti pelabuhan dan jalan dibutuhkan untuk menurunkan biaya logistik pada rantai nilai domestik, memperkuat integrasi internal, serta meningkatkan daya saing, sehingga keseluruhan nusantara dapat menjadi zona produksi yang berorientasi ekspor. Di luar Jawa, ketersediaan infrastruktur berkualitas dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif sehingga mendorong diversifikasi sektor ekonomi (Lihat Boks 15.2). Dari sisi sumber daya manusia, diperlukan upaya peningkatan ketersediaan tenaga kerja berkeahlian dan partisipasi sekolah di daerah pedesaan. Meskipun struktur demografi Indonesia unggul atas ketersediaan tenaga kerja usia produktif, namun mayoritas merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah (Grafik 15.12 dan 15.13). Sedangkan penguatan

18 Konsep kredibilitas, efektivitas, dan kecepatan mengacu pada Santoro, M. 2015. *Long-term Gain, Short-Term Pain: Assessing the Potential Impact of Structural Reforms in Chile*. IMF Working Paper.

19 Kajian *Growth Diagnostic* telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk 11 provinsi pada tahun 2015. Selengkapnya lihat Boks 15.2.

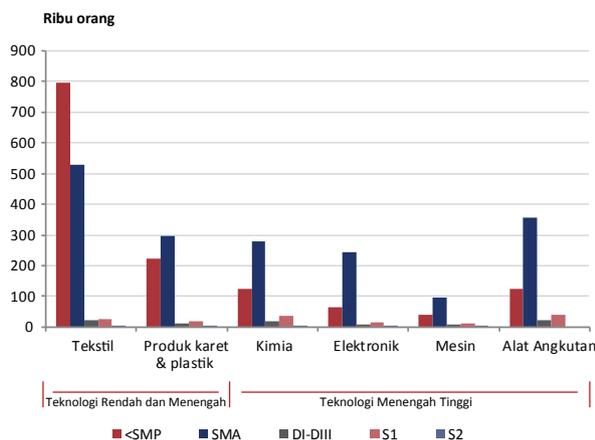
Grafik 15.12. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Umur



Sumber: BPS-SAKERNAS, 2014²⁰

struktur ekonomi pada sektor teknologi menengah-tinggi membutuhkan banyak tenaga kerja dengan pendidikan atau *skill* yang lebih tinggi. Saat ini, Indonesia masih menghadapi *gap* yang cukup besar pada kualitas pendidikan tenaga kerja, sebagaimana tercermin pada nilai PISA sains dan matematika yang terpaut cukup besar dibandingkan beberapa negara lainnya di Asia (Tabel 15.2). Lebih jauh, laju transformasi Indonesia menjadi negara industri juga membutuhkan dukungan peningkatan produktivitas pertanian di pedesaan, khususnya dalam mencapai target swasembada pangan. Tingkat pendidikan yang lebih rendah di daerah pedesaan dapat menghambat peningkatan produktivitas, sehingga partisipasi sekolah di pedesaan, khususnya pada tingkat pendidikan menengah

Grafik 15.13. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan



Sumber: BPS-SAKERNAS, 2014²⁰

²⁰ Klasifikasi sektor berdasarkan teknologi rendah, menengah, dan tinggi merujuk pada OECD *Technology Intensity Definition* (2011).

Tabel 15.2. Nilai PISA Beberapa Negara di Asia

Negara	Sains	Matematika
Tiongkok	613	570
Hong Kong	561	545
Singapura	573	542
Jepang	536	538
Korea Selatan	554	536
Taiwan	560	523
Thailand	427	441
Kazakhstan	432	393
Indonesia	375	396
Rata-rata Asia	613	570
Rata-rata OECD	561	545

dan tinggi perlu ditingkatkan. Pada akhirnya keseimbangan produktivitas antara masyarakat pedesaan dan perkotaan akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Reformasi kelembagaan sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan iklim usaha yang kompetitif secara global dan menarik investasi. Indikator kemudahan berusaha menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan peringkat kemudahan berusaha dari 120 (2015) menjadi 109 (2016). Perkembangan positif terutama diperoleh dari pembayaran pajak, izin konstruksi, dan akses kredit. Namun terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, berupa: (i) waktu, biaya, dan prosedur dalam memulai usaha; (ii) waktu dan mekanisme pembayaran pajak; dan (iii) waktu dan biaya dalam mengurus pendaftaran properti. Selain itu, permasalahan terkait kemudahan berusaha juga bersumber dari kepastian hukum, izin konstruksi, dan fasilitasi perdagangan. Dalam hal fasilitasi perdagangan, waktu dan biaya yang tinggi dalam ekspor-impor terutama disebabkan oleh hambatan akses di darat dan proses bongkar muat pelabuhan. Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah penyederhanaan birokrasi, dan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, tata kelola, dan bersih.

Tantangan Memperkokoh Stabilitas Ekonomi Makro dan Sistem Keuangan

Penciptaan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan merupakan faktor fundamental untuk mempercepat reformasi struktural dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tren globalisasi yang mendorong semakin terintegrasinya ekonomi nasional terhadap global dapat terjadi melalui tiga mekanisme yang terdiri

dari kinerja perdagangan yang semakin kompetitif, rantai perdagangan global melalui multinasional produksi, dan integrasi pasar keuangan. Untuk itu, struktur ekonomi makro yang kuat dan stabil merupakan salah satu prasyarat untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terutama menghadapi berbagai gejolak yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Ke depan, risiko masih melambatnya ekonomi domestik dan belum berimbangnya pemulihan ekonomi global menjadi satu hal yang patut diwaspadai. Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian stabilitas ekonomi makro guna mengarahkan ekspektasi melalui pengendalian laju inflasi dan kestabilan nilai tukar. Namun upaya tersebut menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama mengingat masih tingginya fluktuasi harga beberapa bahan makanan, risiko pembalikan modal asing, serta berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Oleh sebab itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang didukung oleh kebijakan reformasi struktural diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat stabilitas ekonomi makro melalui penguatan fungsi pasar modal dan pasar uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, termasuk penguatan sektor ekonomi.

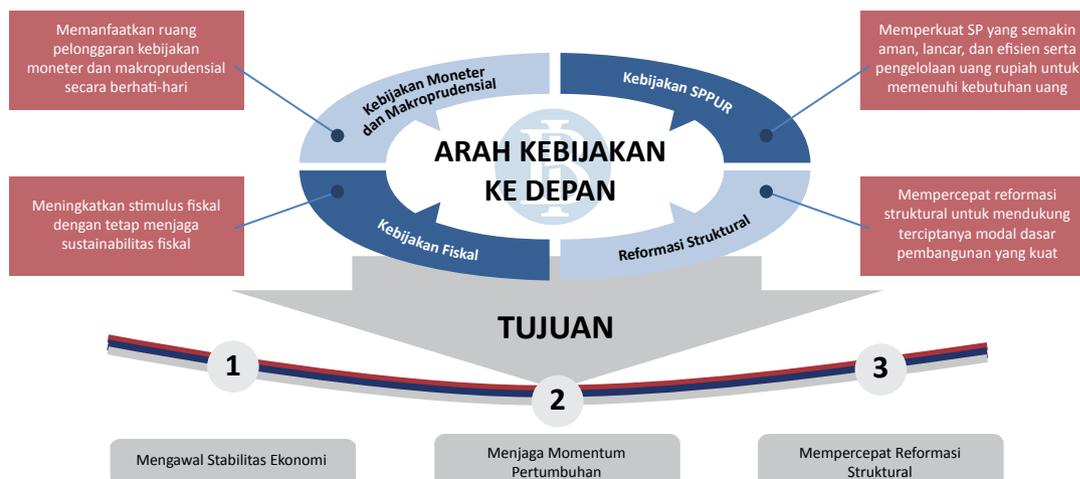
Pencapaian stabilitas sistem keuangan juga menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan dan perdagangan Indonesia. Untuk mendukung tercapainya stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, perlu terus dilakukan upaya penguatan kebijakan makroprudensial dan kegiatan *surveillance* terhadap sistem keuangan. Respons kebijakan di bidang SSK tersebut juga bersinergi dengan kebijakan di bidang moneter dan sistem pembayaran, yang didukung dengan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Di sisi lain, pencapaian SSK juga perlu didukung dengan ketersediaan

dan terpenuhinya kebutuhan pecahan uang rupiah yang merata di masing-masing daerah. Beragamnya kualitas uang, khususnya di wilayah terpencil dan pulau terdepan NKRI, serta terbatasnya pemenuhan kebutuhan pecahan uang rupiah merupakan tantangan yang dihadapi dan menjadi fokus kebijakan Bank Indonesia. Sementara itu, peredaran uang rupiah palsu yang meningkat selama 2015 juga merupakan tantangan yang dihadapi Bank Indonesia untuk tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

15.2. ARAH KEBIJAKAN

Ke depan, berbagai tantangan, baik dari eksternal maupun domestik, perlu diwaspadai agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Untuk itu, sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat. Bauran kebijakan tersebut diarahkan untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah panjang akan dapat dicapai (Diagram 15.1). Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati. Di sisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Di samping itu, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mempercepat reformasi struktural agar segera tercipta fondasi perekonomian yang kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diagram 15.1. **Framework Bauran Kebijakan Pengelolaan Makroekonomi**



Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati. Di sisi moneter, melalui kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), dan nilai tukar, Bank Indonesia secara konsisten dan berhati-hati akan menempuh kebijakan yang mengarahkan inflasi sesuai dengan sarannya, mengelola defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat, dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang telah tercipta. Dalam kerangka ini, kebijakan suku bunga akan ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi, permintaan domestik, serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya. Kebijakan ini konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi dan defisit transaksi berjalan yang sehat dengan tetap mendukung momentum pertumbuhan yang sedang berjalan. Kebijakan GWM senantiasa dikalibrasi secara berhati-hati untuk mendukung kecukupan likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan nilai tukar tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan nilai fundamental. Upaya menjaga stabilitas rupiah ini sangat penting untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan sehingga akan memperkuat kinerja perekonomian secara keseluruhan. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan operasi moneter baik rupiah maupun valas. Berbagai kebijakan tersebut juga akan terus diperkuat Bank Indonesia antara lain melalui pengelolaan lalu lintas devisa yang berhati-hati dan penguatan jaring pengaman keuangan internasional melalui kerja sama dengan berbagai otoritas pemangku kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia akan menempuh beberapa langkah strategis untuk memperkuat kerangka kebijakan makroprudensial. Pertama, mempertegas fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Kedua, Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan ketahanan permodalan perbankan, menjaga kecukupan likuiditas, dan memperdalam pasar keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga yang merata di daerah melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan di tingkat nasional dan daerah. Keempat, Bank Indonesia

berkolaborasi dengan OJK akan terus mengembangkan peran ekonomi dan sistem keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia. Hal ini antara lain ditempuh melalui pengembangan instrumen moneter dan instrumen keuangan berbasis syariah.

Bank Indonesia juga melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat resiliensi pasar keuangan terhadap guncangan dan meningkatkan perannya sebagai sumber pembiayaan yang efisien. Upaya pendalaman pasar keuangan diperkuat dengan penyamaan visi pendalaman pasar keuangan lintas otoritas, khususnya dalam mendukung pembiayaan perekonomian. Untuk itu, akan dibentuk “Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan” yang terdiri dari Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia. Forum ini penting bagi upaya pendalaman pasar, dan bertugas untuk menyusun usulan dan rekomendasi kebijakan bagi masing-masing otoritas untuk mendorong pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Ketiga otoritas tersebut saat ini dalam tahap finalisasi penyusunan MoU.

Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pelaku pasar juga merupakan salah satu program penting yang secara kontinu akan dilakukan di masa datang. Tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama terhadap pasar keuangan dan berperilaku sangat konservatif dengan hanya menggunakan dana sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Peningkatan *financial literacy* menjadi sangat penting bagi upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Berkenaan dengan hal ini, pelaksanaan program sosialisasi, koordinasi dan edukasi akan direncanakan secara komprehensif dan terintegrasi, dan dilakukan tidak hanya dengan pelaku pasar, tapi juga dengan penegak hukum, lembaga arbitrase, auditor, dan lembaga terkait lainnya.

Kebijakan perluasan akses keuangan akan terus didorong untuk mendukung tercapainya SSK, efisiensi perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bank Indonesia akan mensinergikan kebijakan perluasan akses yang fokus pada pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai *point of access* dengan kebijakan elektronifikasi sebagai pengembangan ekosistem LKD, yang dikenal dengan dual kebijakan (Gambar 15.2).²¹ Sinergi tersebut dilakukan karena disadari efektivitas peningkatan akses keuangan melalui saluran distribusi saja tidaklah cukup jika adaptasi masyarakat atas cara penggunaan layanan pembayaran masih rendah. Sinergi strategi ini salah satunya akan diterapkan pada

21 Elektronifikasi adalah segala upaya untuk melakukan transaksi ritel secara non tunai.

dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI. Untuk itu, dilakukan penguatan koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, peningkatan infrastruktur pengolahan uang rupiah, dan perluasan kerja sama dengan industri. Penguatan aspek *governance* juga dilakukan melalui: (i) penguatan koordinasi dengan Pemerintah berupa penyempurnaan kebijakan perencanaan pencetakan uang rupiah secara *multi years*; (ii) penguatan infrastruktur pengelolaan uang rupiah melalui modernisasi peralatan pemrosesan uang rupiah di seluruh kantor Bank Indonesia; (iii) perluasan peran perbankan maupun badan usaha melalui pemberian insentif kepada industri yang melakukan kegiatan pengiriman uang dan layanan kas kepada perbankan dan masyarakat; dan (iv) mitigasi risiko terhadap perencanaan pencetakan uang secara *multi years*, seperti mitigasi terhadap dinamika indikator makro ekonomi, perubahan harga dan kualitas bahan baku uang, serta ketersediaan pasokan bahan baku dalam jangka menengah. Di samping itu, juga dilakukan penguatan sistem pengawasan terhadap perbankan yang menyelenggarakan kas titipan dan pengaturan terhadap badan usaha yang menyelenggarakan jasa pengolahan uang rupiah.²²

Kebijakan Fiskal

Peran kebijakan fiskal untuk mendorong perekonomian Indonesia semakin penting ditengah pelemahan perekonomian dan ketidakpastian sektor keuangan global. Pelemahan perekonomian global, penurunan harga komoditas dan kinerja perekonomian domestik, akan memberikan tekanan pada penerimaan pendapatan pemerintah dan mengurangi ruang fiskal.²³ Untuk itu, perlu ditempuh upaya optimalisasi kebijakan fiskal melalui pemberian stimulus terhadap perekonomian secara langsung melalui penyaluran belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan struktural. Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk memperkuat fundamental perekonomian serta mendukung ketahanan perekonomian domestik. Paket kebijakan tersebut ditujukan untuk

meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, meningkatkan ketahanan fiskal, dan menjaga terlaksananya program prioritas pembangunan, serta mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Dalam jangka pendek, upaya pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan melalui stimulus fiskal. Pelaksanaan upaya pemerintah tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul, seperti keterbatasan ruang fiskal maupun penyerapan anggaran yang kurang optimal serta cenderung menumpuk di akhir tahun. Guna mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu upaya untuk mengelola anggaran lebih efisien dan berkualitas, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran negara.

Dari sisi pendapatan, fokus pemerintah meningkatkan pendapatan diarahkan menjadi dua kebijakan, yaitu kebijakan penerimaan pajak dan bukan pajak. Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, serta mengendalikan konsumsi barang kena cukai. Selain itu, pencapaian target penerimaan pajak dilakukan dengan penerapan kebijakan *extra effort*, melalui: (i) optimalisasi pemeriksaan dengan fokus pada sektor unggulan masing-masing, *transfer pricing*, dan *fraud*; (ii) ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak melalui optimalisasi IT, *e-tax invoice*, serta perbaikan regulasi; dan (iii) implementasi tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum.

Fokus belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2016 mencakup tiga dimensi pembangunan, serta satu kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung (Gambar 15.3). Dimensi pembangunan manusia merupakan penjabaran Nawa Cita, meliputi peningkatan kualitas hidup manusia, melalui bidang pendidikan, perumahan, air minum dan sanitasi serta kesehatan. Dimensi pembangunan sektor unggulan berupa peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar internasional dan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi pemerataan dan kewilayahan ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup melalui pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Di samping itu, dukungan keberlangsungan pembangunan memerlukan dukungan dari kepastian

22 Pengaturan terhadap badan usaha tersebut merupakan bagian dari transformasi Bank Indonesia, yang secara garis besar akan memberikan pedoman pada kegiatan distribusi uang rupiah (*cash distribution*), pemrosesan uang rupiah yang mencakup penghitungan, sortasi, dan pengemasan (*cash processing*); penyimpanan uang rupiah di khazanah (*cash in safe*), dan pengisian uang rupiah di ATM, serta pengambilan uang rupiah di CDM, berikut pemantauan kecukupan uang rupiah pada ATM dan/atau CDM (*cash replenishment*).

23 Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatasi besaran defisit fiskal tidak melebihi 3% Produk Domestik Bruto.

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Pemenuhan anggaran pendidikan 20% APBN.
2. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat atas akses air minum dan dukungan pelaksanaan Program Sejuta Rumah.
3. Pemenuhan anggaran kesehatan 5% APBN.

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin serta perluasan dan penajaman program KUR.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sektor strategis dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial.

APBN 2016

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

1. Meningkatkan: produksi energi primer, pemanfaatan gas dan batubara, pelayanan energi, energi baru dan terbarukan.
2. Penegakan hukum di laut, transportasi untuk industri, penindakan perikanan liar, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.
3. Produksi, stabilitas harga dan pasokan, kualitas pangan dan gizi, penanganan ketahanan pangan.

KONDISI PERLU

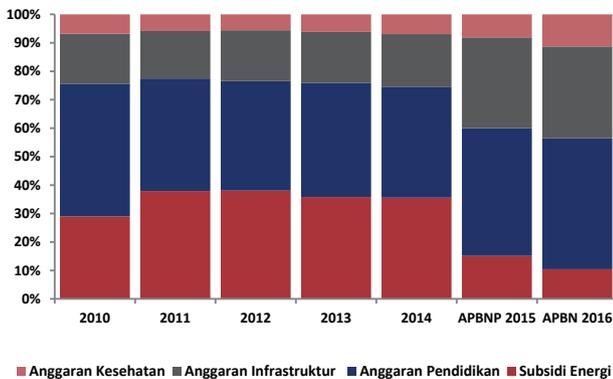
1. Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan serta politik dan demokrasi.
2. Penataan/restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis.

dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Dari sisi belanja negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan ruang fiskal melalui optimalisasi pendapatan, melanjutkan efisiensi subsidi dan belanja, pengendalian *earmarking* dan belanja wajib, serta penguatan dan penyelarasan desentralisasi fiskal.

Reformasi subsidi energi dilakukan dengan merealokasi belanja subsidi energi kepada belanja yang lebih produktif, berupa subsidi pangan, bunga kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR), benih, dan *Public Service Obligation*

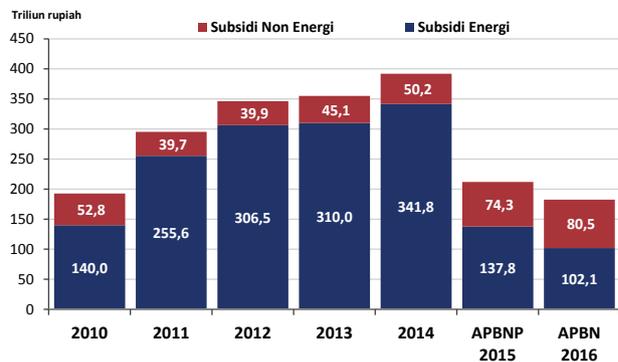
(Grafik 15.14). Kebijakan ini selanjutnya disempurnakan pada awal tahun 2015 dengan implementasi skema subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan premium. Reformasi tersebut masih akan dilanjutkan pada 2016 terutama pada tarif tenaga listrik dan LPG, guna melanjutkan penyaluran subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran serta realokasi anggaran kepada belanja yang lebih produktif yaitu anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Grafik 15.15). Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan agar sejalan dengan upaya pembangunan sektor unggulan serta pemerataan dan kewilayahan.

Grafik 15.14. Perbandingan Subsidi Energi, Anggaran Pendidikan, Infrastruktur, dan Kesehatan



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 15.15. Perkembangan Subsidi Pemerintah



Sumber: Kementerian Keuangan

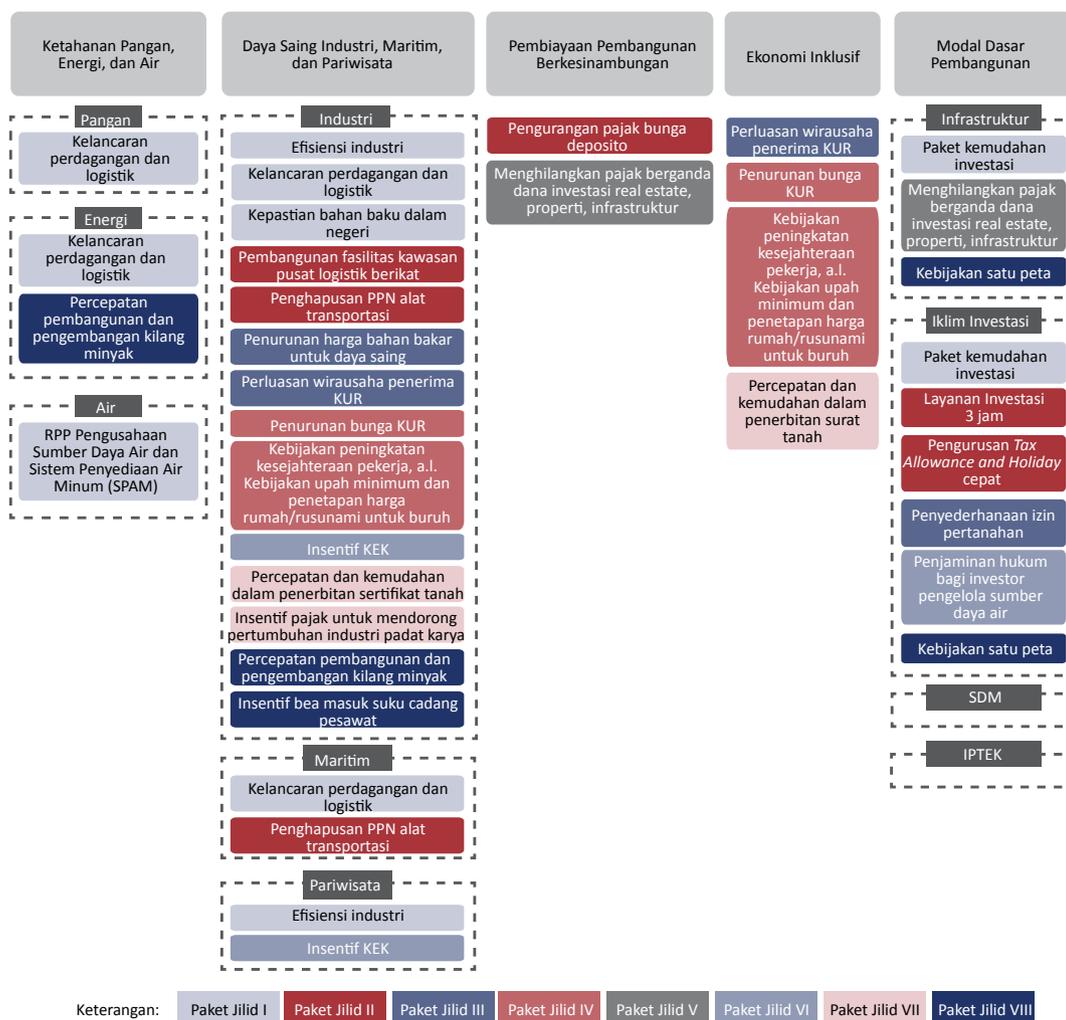
Kebijakan Reformasi Struktural

Selama tahun 2015, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk memperkuat fundamental perekonomian Indonesia, namun masih terdapat ruang perbaikan dengan dilengkapi kebijakan struktural lainnya (Gambar 15.4). Secara umum, paket kebijakan yang telah ditempuh cenderung lebih fokus pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan UMKM. Sedangkan kebijakan terkait pangan-energi, dan pembiayaan berkesinambungan terhitung relatif minim. Meski masih dini untuk mengevaluasi dampak berbagai paket kebijakan dimaksud, namun perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan sinyal dan tren yang positif. Untuk itu, agenda reformasi struktural perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menjawab isu struktural yang terkait, seperti ketahanan pangan, energi, dan air, peningkatan daya saing industri maritim dan pariwisata, pembiayaan pembangunan berkesinambungan, ekonomi

yang lebih inklusif, penguatan sumber daya manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai paket kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan daya saing. Dari sisi pangan, kebijakan pembangunan diperlukan khususnya dalam menjawab tantangan peningkatan produktivitas. Dari sisi energi, masih diperlukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan produksi dan efisiensi. Sementara terkait industri, penyusunan kebijakan diarahkan pada peningkatan daya saing, produktivitas dan muatan teknologi. Pada sektor maritim, arah kebijakan perlu ditujukan pada penguatan kedaulatan wilayah, pengelolaan SDA, konektivitas, dan pengembangan ekonomi. Sementara, sektor pariwisata memerlukan kebijakan yang mengarah pada penguatan infrastruktur, fasilitas wisata, dan kapasitas SDM. Dukungan pembiayaan yang berkesinambungan memerlukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber dana berbasis jangka

Gambar 15.4. Pemetaan Paket Kebijakan Pemerintah Tahun 2015



panjang yang bersumber dari domestik maupun luar negeri. Terkait ekonomi inklusif, diperlukan kebijakan yang mengarah pada pemerataan pembangunan dan akses keuangan. Sementara terkait SDM dan IPTEK, diperlukan kebijakan yang mengarah pada upaya mendorong kesuksesan Indonesia bertransisi menjadi negara berpendapatan tinggi.

Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Potensi sektor pertanian yang besar belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum mampu ditransformasikan menjadi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Peran sektor pertanian pada PDB relatif masih rendah, padahal sektor tersebut menyerap sebagian besar penduduk Indonesia (34%), yang justru sebagian besarnya tercatat sebagai rumah tangga miskin. Rendahnya produktivitas serta berbagai permasalahan dari sisi produksi, distribusi, pemasaran, maupun sisi institusi dan kebijakan, memerlukan suatu reformasi kebijakan struktural menyeluruh. Fokus perwujudan ketahanan pangan terutama pada peningkatan produksi untuk mencapai swasembada, penguatan stabilisasi harga dan pasokan, perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat, serta penanganan gangguan ketahanan pangan, yang dituangkan pada beberapa program kebijakan. Program tersebut antara lain meliputi pembukaan lahan baru, perbaikan dan pembangunan irigasi, pembangunan pasar dan sarana-prasarana transportasi, pemulihan kesuburan lahan, pengembangan dan pembangunan gudang dengan fasilitas yang memadai, pengembangan bank pertanian dan UMKM, peningkatan kemampuan petani, pembangunan agribisnis kerakyatan, pengendalian impor pangan, serta reformasi regulasi agraria.

Sedangkan untuk mewujudkan ketahanan energi, arah kebijakan difokuskan pada empat prioritas kebijakan, yaitu: peningkatan produksi dan cadangan energi primer, peningkatan bauran energi, perluasan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan energi dan listrik, serta pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran. Urgensi penyelesaian permasalahan energi nasional tertuang dalam RPJMN 2015-2019, dimana kedaulatan energi dan ketenagalistrikan menjadi prioritas ke-7 Nawa Cita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedaulatan energi merupakan sasaran sektor ESDM, dengan target pendapatan pemerintah Rp1.994 triliun, sedangkan total investasi dan pendanaan pada sektor energi dan sumber daya mineral ditargetkan 273 miliar dollar AS dengan pendanaan APBN pada Kementerian ESDM Rp71,5 triliun. Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan air nasional, kebijakan Pemerintah dipadukan

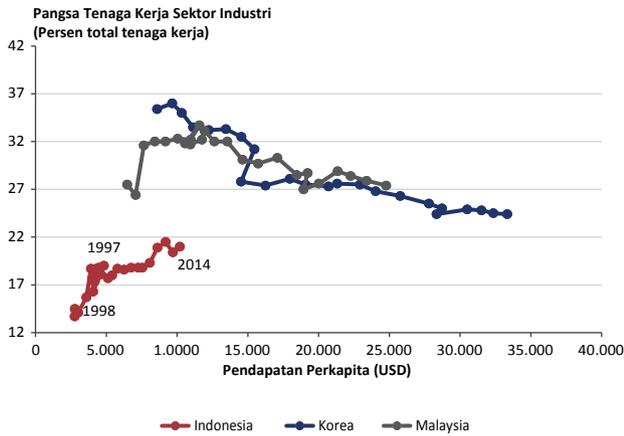
dengan konservasi sumber daya air. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain pembangunan waduk, peningkatan akses air minum dan sanitasi, pengembangan infrastruktur konservasi air, perlindungan sumber air alami, sertapengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Peningkatan daya saing industri, maritim, dan pariwisata

Dalam upaya menjawab tantangan daya saing industri, maritim, dan pariwisata, pemerintah akan fokus menerapkan berbagai strategi pembangunan. Fokus kebijakan industri berupa pengembangan industri di luar Jawa, peningkatan populasi industri, penguatan integrasi dalam rantai nilai dunia, serta peningkatan daya saing dan produktivitas. Pengembangan wilayah industri di luar Jawa dengan memfasilitasi pembangunan kawasan industri, sentra industri kecil-menengah, infrastruktur pendukung industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja. Sedangkan peningkatan populasi industri dengan mendorong investasi industri hilirisasi SDA yang memenuhi kebutuhan konsumsi domestik dan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, dan terintegrasi dalam rantai nilai global. Pemerintah juga akan membina industri kecil dan menengah agar dapat berafiliasi dengan industri besar yang terhubung dalam rantai nilai global. Untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas, Pemerintah akan meningkatkan efisiensi teknis, mendorong penguasaan iptek dan inovasi, serta membangun SDM yang lebih berkualitas sebagai bagian dari *labor reform* di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, keterlibatan investor asing dalam bentuk FDI diperlukan dalam memperluas basis industri dan peningkatan produktivitas sebagai bagian dari penguatan struktur industri di Indonesia secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan *institutional reform* yang telah ditempuh guna memperkuat kepastian hukum dan efisiensi birokrasi yang menopang penguatan daya saing industri Indonesia. Strategi utama agar proses *catching-up* menuju negara pendapatan tinggi dapat tercapai, yaitu dengan meningkatkan partisipasi industri manufaktur Indonesia dalam rantai nilai global yang didukung oleh perbaikan modal dasar investasi, penyediaan modal dasar pembangunan dan implementasi strategi akses ke pasar global. Arah kebijakan yang mendukung peningkatan industrialisasi perlu terus didorong mengingat peningkatan pendapatan perkapita Indonesia cenderung berjalan lambat seiring dengan terbatasnya pangsa tenaga kerja sektor industri Indonesia (Grafik 15.16).

Dari sisi maritim, penguatan kedaulatan maritim, pengentasan penangkapan ikan liar, pembangunan konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, menjadi program yang akan

Grafik 15.16. Pangsa Tenaga Kerja Sektor Manufaktur dan Pendapatan Perkapita



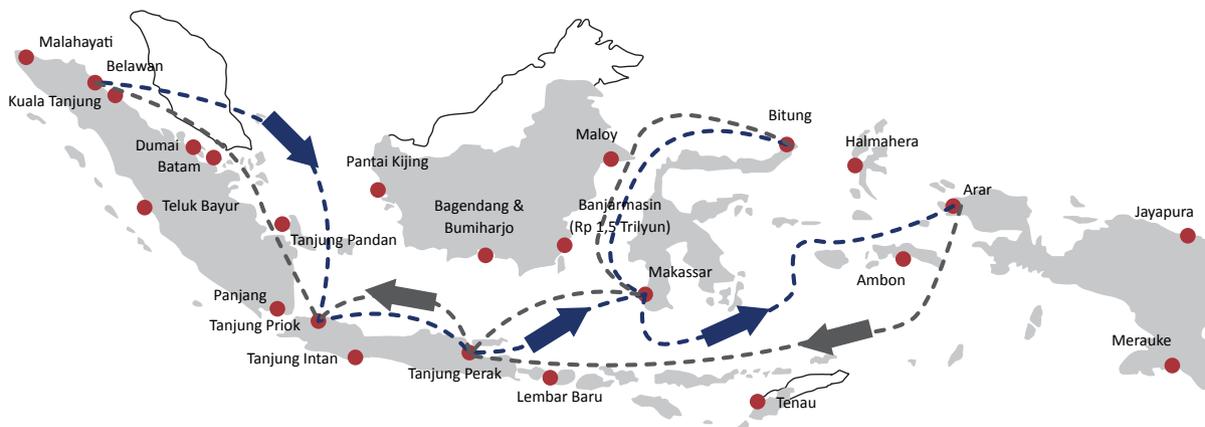
ditempuh. Pemerintah akan menyelesaikan tata batas laut dan mendaftarkan pulau-pulau kecil ke PBB, mengatur dan mengendalikan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta memperkuat pengawasan dan keamanan laut. Untuk mengurangi tindakan perikanan liar, melalui peningkatan jumlah hari operasi kapal pengawas dan pengawasan melalui udara. Pembangunan konektivitas nasional dilakukan dengan pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut dan program poros maritim (Gambar 15.5), penyediaan trayek dan kapal perintis, pembangunan kapal perintis penumpang dan barang, serta revitalisasi lokasi industri galangan kapal. Sedangkan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dilakukan melalui peningkatan armada perikanan terutama kapal dengan tonase besar, membina kawasan minapolitan dan pusat perbenihan, serta pengembangan kawasan perikanan budidaya.

Pengembangan pariwisata dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan destinasi pariwisata, meningkatkan pemasaran, membangun industri pariwisata, dan memperkuat kelembagaan. Tahun 2016, pemerintah menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara, dengan target perolehan devisa mencapai Rp172,8 triliun. Pembangunan destinasi pariwisata dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan lokasi pariwisata serta meningkatkan citra kepariwisataan, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan pemasaran, Pemerintah akan memperkuat kerja sama internasional kepariwisataan. Sedangkan pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui pembinaan masyarakat lokal, fasilitasi investasi, pengembangan standarisasi dan sertifikasi, serta integrasi ekosistem pariwisata. Untuk memperkuat kelembagaan, kebijakan akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, fasilitasi peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja, peningkatan kualitas penelitian, dan pengelolaan manajemen perubahan.

Penguatan basis pembiayaan pembangunan

Dalam rangka menjawab tantangan penguatan basis pembiayaan pembangunan ekonomi diperlukan upaya terkoordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah serta otoritas keuangan lainnya. Tantangan utama pembiayaan pembangunan ekonomi berupa keterbatasan sumber pendanaan jangka panjang. Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terintegrasi dengan perekonomian global, mendorong kesempatan untuk mendapatkan sumber pembiayaan jangka panjang antara lain melalui PMA. Untuk itu, peran pemerintah sangat diharapkan guna memperkuat kondisi fundamental perekonomian

Gambar 15.5. Rencana Pengembangan 24 Pelabuhan Strategis



Sumber: Kementerian Perhubungan, 2015

antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Perbaikan tersebut diharapkan akan berdampak positif pada integrasi internal Indonesia dan daya tarik Indonesia bagi aktivitas *off shoring* oleh produsen-produsen global. Selain itu, peran kebijakan fiskal melalui optimalisasi ruang fiskal juga menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian.

Di sisi pasar keuangan, penguatan basis pembiayaan pembangunan dilakukan dalam konteks *financial sector reforms* dengan terus mendorong pendalaman pasar keuangan guna mewujudkan pasar keuangan domestik yang lebih likuid dan efisien. Kondisi pasar keuangan sangat penting untuk mendukung stabilitas moneter, SSK serta pembiayaan pembangunan ekonomi domestik. Pasar keuangan yang berkembang dapat lebih *resilient* terhadap tekanan internal dan eksternal, mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan akan berkontribusi sebagai alternatif sumber pembiayaan ekonomi. Peran Bank Indonesia dalam pendalaman pasar keuangan, untuk menjawab tantangan di pasar uang rupiah dan valas, serta pasar keuangan syariah, mengacu pada *blueprint* pendalaman pasar keuangan Indonesia yang mencakup penyusunan *framework*, strategi, program kerja, dan *roadmap* pendalaman jangka panjang. Sementara itu, di pasar modal dan pasar keuangannya lainnya, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam berkoordinasi dengan otoritas terkait dalam rangka mendorong pengembangan pasar modal dan pasar keuangan lainnya. Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK terus berupaya mencari solusi untuk pengembangan pasar obligasi melalui kemudahan dan percepatan pemberian ijin penerbitan obligasi korporasi.

Upaya pendalaman pasar uang rupiah dilakukan dengan menyerap surplus likuiditas melalui instrumen jangka panjang, sekaligus mengembangkan instrumen pasar uang dan meningkatkan kepercayaan bertransaksi antar pelaku. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah menyiapkan beberapa kebijakan guna mengembangkan pasar repo. Sementara itu, upaya pendalaman pasar uang rupiah melalui pengembangan PUAB guna meningkatkan efisiensi transaksi *unsecured* dilakukan dengan mendorong peningkatan *credit line* antarbank, serta peningkatan peran *reference rate* melalui penerapan *hittable* JIBOR. Untuk pengembangan pasar Repo, Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK berupaya untuk meningkatkan jumlah bank yang menandatangani *Global Master Repo Agreement* (GMRA) Indonesia, dan bertransaksi repo dengan menggunakan GMRA Indonesia. Dalam kaitan ini, upaya langsung berupa sosialisasi dan edukasi secara terintegrasi antara BI dan OJK akan dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman pelaku pasar terhadap

transaksi Repo dan penggunaan GMRA sebagai perjanjian transaksi yang solid. Dalam rangka meningkatkan *governance* dalam bertransaksi di pasar uang, Bank Indonesia akan melakukan pengaturan di pasar uang, pengaturan instrumen pasar uang, prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi, pengaturan infrastruktur, mekanisme pelaporan dan pengawasan, yang akan dituangkan dalam pengaturan PBI Pasar Uang sebagai payung dari transaksi dan perdagangan instrumen di pasar uang. Bank Indonesia juga akan mendorong penerbitan *negotiable certificate of deposit* (NCD) melalui penetapan kriteria NCD yang dapat ditransaksikan di pasar uang. Dalam rangka penambahan instrumen di pasar uang, Bank Indonesia saat ini sedang mengkaji kemungkinan pengembangan instrumen *commercial paper* sebagai salah satu alat pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi korporasi non-bank.

Sementara itu, pengembangan pasar valas terutama ditujukan untuk mendorong pengembangan instrumen pasar uang valas, meningkatkan *credit line* antarbank, serta terus mengembangkan berbagai instrumen derivatif. Pengembangan instrumen pasar valas antara lain melalui ketersediaan pengembangan instrumen *structured product* secara terbatas dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban lindung nilai bagi korporasi non-bank. Untuk mendorong peningkatan likuiditas di pasar derivatif, BI juga akan berkoordinasi dengan kementerian BUMN untuk mendorong peningkatan transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh BUMN. Dalam rangka standardisasi kontrak derivatif, BI akan berupaya menstandarisasi bentuk kontrak transaksi derivatif yang tidak hanya sesuai dengan *best practice* namun juga lebih mudah untuk dipahami oleh pelaku pasar maupun stakeholder lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi pasar keuangan domestik, sehingga menjadi kontrak yang implementatif. Bank Indonesia bekerjasama dengan OJK menempuh beberapa langkah penyempurnaan ketentuan yang dinilai sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini.

Penguatan Ekonomi Inklusif

Upaya mewujudkan dan menguatkan ekonomi yang inklusif, telah menjadi perhatian Pemerintah yang dituangkan melalui sejumlah strategi kebijakan. Skema pemerataan pembangunan antar wilayah tertuang dalam beberapa kebijakan Nawa Cita, dimana dalam jangka menengah – pendek, Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dimensi pembangunan manusia berupa pemenuhan akses kebutuhan dasar, dimensi pemerataan pembangunan dan kewilayahan.²⁴ Disamping

²⁴ Meliputi pembangunan desa, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pengembangan pusat perekonomian di luar Jawa.

itu, juga disusun langkah strategis pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, layak hidup yang didukung oleh pengembangan lingkungan dan berbasis teknologi.

Upaya penguatan ekonomi inklusif juga perlu didukung oleh penciptaan sistem keuangan yang inklusif. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus mendorong terciptanya sistem keuangan inklusif melalui perluasan akses layanan keuangan yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pendapatan. Namun saat ini akses penduduk Indonesia terhadap sistem keuangan formal masih relatif rendah yaitu hanya menjangkau sekitar 52% total penduduk (Bank Dunia, 2010), dimana hanya 50% masyarakat yang menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank. Sehingga diperlukan keterlibatan dan kerja sama antara Bank Indonesia dan regulator, kementerian dan lembaga pemerintah yang baik dan terstruktur.

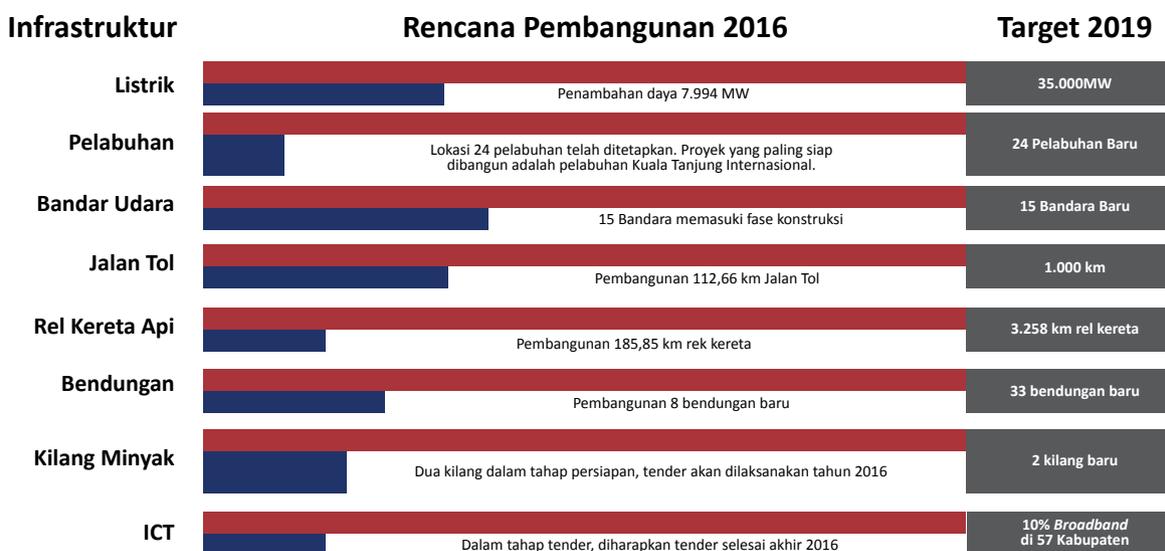
Bank Indonesia juga akan terus berupaya untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional melalui perluasan transaksi nontunai. Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta industri sistem pembayaran, inisiatif pembayaran nontunai akan didorong melalui perluasan pembayaran digital yang terintegrasi melalui pembangunan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pengembangan ini mengacu pada rencana strategis pengembangan GPN yang telah disusun Bank Indonesia, yang mencakup strategi bisnis, fungsi dan cakupan layanan, tahapan dan prioritas pengembangan,

kepemilikan dan penyelenggaraan, serta metode pengembangan infrastruktur GPN. Rencana strategis tersebut akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia yang dapat melayani berbagai transaksi pembayaran ritel secara luas dan terintegrasi sesuai kebutuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan peran pelaku nasional.

Penguatan modal dasar pembangunan

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan empat pilar perekonomian di atas perlu didukung dengan reformasi struktural pada sisi infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, serta IPTEK. Terkait infrastruktur, pemerintah menetapkan tema Rencana Kerja tahun 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan infrastruktur sebagai dasar untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas melalui peningkatan *public capital stock*. Pemerintah juga menyusun 225 Proyek Strategis Nasional dan 30 Proyek Prioritas sebagai fokus pembangunan infrastruktur, yang meliputi peningkatan kapasitas energi, penguatan konektivitas nasional serta penguatan konektivitas digital (Gambar 15.6). Untuk memelihara momentum reformasi struktural, tercapainya target pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dalam jangka pendek, ekspektasi dunia usaha dan rumah tangga akan terus terjaga, sehingga mendorong kenaikan investasi dan konsumsi. Sementara dalam jangka panjang, akan mendorong kenaikan produktivitas dan perbaikan daya saing.

Gambar 15.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur 2016 dan Target 2019



Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP)

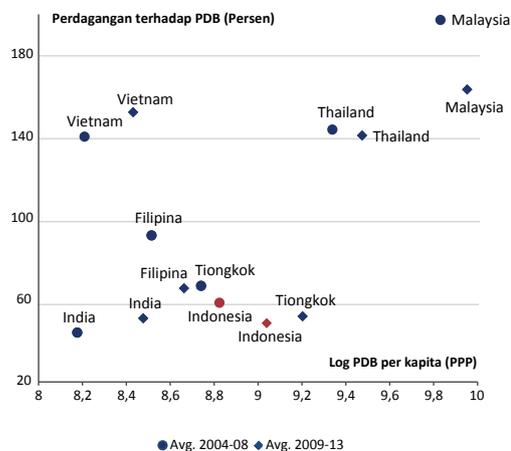
Defisit transaksi berjalan Indonesia yang telah terjadi sejak akhir tahun 2011 disebabkan salah satunya oleh melemahnya kinerja ekspor Indonesia. Pelemahan ini dipengaruhi dua faktor utama, yaitu faktor domestik, masalah struktural pada industri dan perdagangan, dan faktor eksternal, berupa penurunan harga komoditas. Kerentanan transaksi berjalan tersebut terkait dengan struktur ekspor Indonesia yang saat ini didominasi oleh industri pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) yang kinerjanya bergantung pada harga komoditas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengoptimalkan potensi Indonesia, perlu dilakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan daya saing industri di pasar global. Industri menjadi sentral dalam transformasi karena merupakan lokomotif pertumbuhan menuju negara maju, menyerap banyak tenaga kerja, dapat menciptakan nilai tambah yang besar, dan pada akhirnya dapat menjadi sumber devisa secara fundamental.

Framework analisa daya saing (*Trade Competitiveness Diagnostics*) yang dikembangkan Reis dan Farole (2012) dapat digunakan untuk mengukur kinerja perdagangan internasional Indonesia dan daya saing faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja ekspor tersebut. Dalam hal ini, kinerja Indonesia dibandingkan dengan *peer countries*-nya.¹

Pada tahapan pertama, analisa daya saing dilakukan analisis kinerja perdagangan (ekspor) pada empat dimensi yaitu *intensive*, *extensive*, *quality* dan *sustainability margin*.² Hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor Indonesia tertinggal dibandingkan negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand. Ekspor Indonesia masuk dalam klasifikasi negara *low middle income* yang cenderung berbasis SDA dengan nilai tambah rendah. Indonesia terlihat mengalami penurunan kinerja pada keempat dimensinya dengan isu utama pada *intensive* dan *quality margin*.

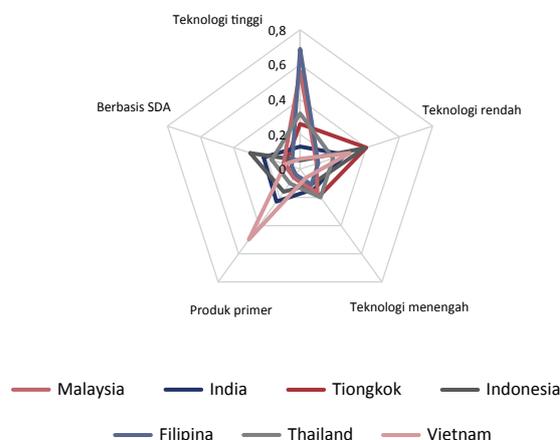
1 Perbandingan secara khusus dilakukan terhadap Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok dan India.
2 Yang pertama adalah *intensive margin* yang tercipta dengan menjual lebih banyak produk yang sama di pasar yang sama. Dimensi kedua, *extensive margin*, adalah arus ekspor baru dari menjual produk baru atau menjual produk yang ada saat ini ke pasar yang baru. Berikutnya *quality margin* terjadi jika kualitas dan kecanggihan produk yang diekspor meningkat. Produk dengan nilai tambah lebih tinggi dari sisi orisinalitas (*ingenuity*), *skill*, dan teknologi akan memiliki harga yang lebih tinggi di pasar. Dimensi terakhir, *sustainability margin* mengevaluasi *survival rate* dari ekspor, baik barang baru maupun barang yang sudah lama diekspor.

Grafik 1 Trade Openness

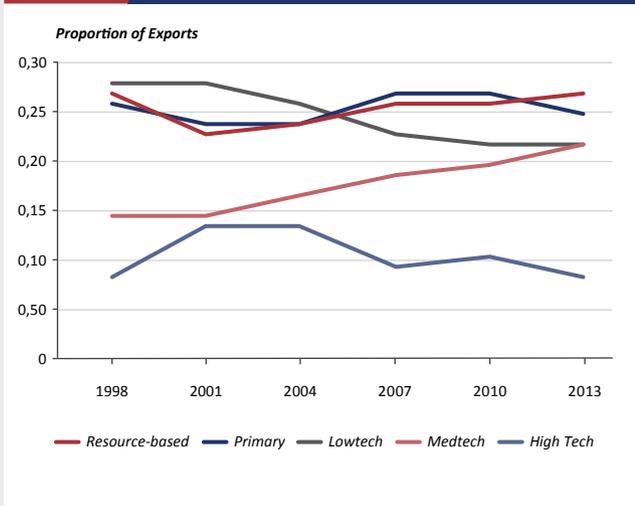


Dimensi *intensive margin* diwakili oleh *trade openness* (rasio ekspor dan impor terhadap PDB) yang merupakan ukuran tingkat integrasi suatu perekonomian dengan perdagangan dunia. Tingkat keterbukaan Indonesia pada tahun 2009-2013 sebesar 50%, menurun dibandingkan tahun 2004-2008 (60%) (Grafik 1). Negara *peers* umumnya mengalami peningkatan *trade openness* dengan level yang lebih tinggi seperti Vietnam (150%) dan Filipina (65%). Dari sisi *extensive margin*, jangkauan ekspor Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara lain. Dari total 3906 produk ekspor Indonesia pada tahun 2013, hanya sekitar 53% atau

Grafik 2 Pangsa Ekspor (2013)



Grafik 3 Perkembangan Pangsa Ekspor Indonesia berdasarkan Komponen Teknologi



2099 produk yang terjual di lebih dari 10 pasar. Angka ini lebih rendah dibandingkan Tiongkok yang mampu menjual 4133 produk, atau 88% dari total produknya ke lebih dari 10 pasar. Selain itu, tingkat kematian produk Indonesia cukup tinggi dengan produk yang bertahan dengan nilai tinggi adalah barang berbasis SDA.

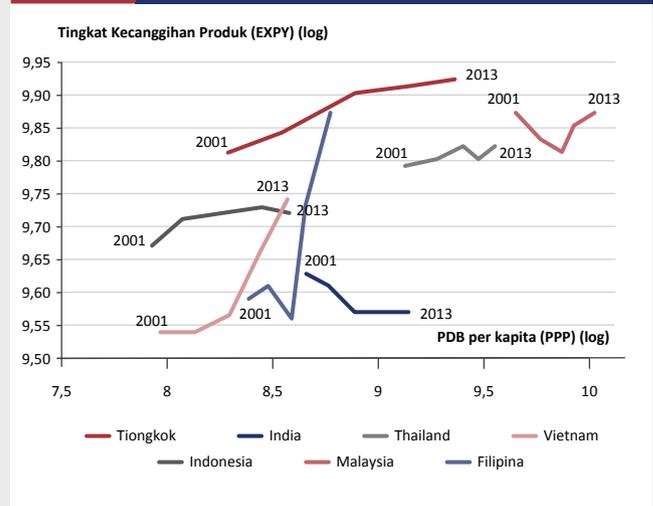
Dari dimensi *quality margin*, Indonesia unggul pada *primary products* namun tertinggal pada produk *high tech* (Grafik 2).³ Selama 2 dekade terakhir, terdapat indikasi pergeseran produk ekspor Indonesia dari *low* dan *high tech* menjadi *med tech* dan *resource-based* (Grafik 3). Ekspor Indonesia juga memiliki tingkat kecanggihan yang rendah dan mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan negara lain (Grafik 4).⁴ Indikator lain adalah *product space* (Hidalgo *et al*, 2007) yang menggambarkan jaringan keterkaitan antar produk dalam perdagangan internasional.⁵ Pada *product space* (Grafik 5), produk yang bernilai tinggi umumnya terletak di daerah inti yaitu kluster industri yang memiliki banyak keterkaitan antar produk (*dense forest*) seperti mesin, metalurgi, dan

3 Klasifikasi produk ekspor menurut komponen teknologi dimungkinkan menggunakan SITC 3 digit berdasarkan Hatzichronoglou (1997) dan Lall (2000).

4 Merujuk pada Hausmann, Hwang and Rodrik (2007).

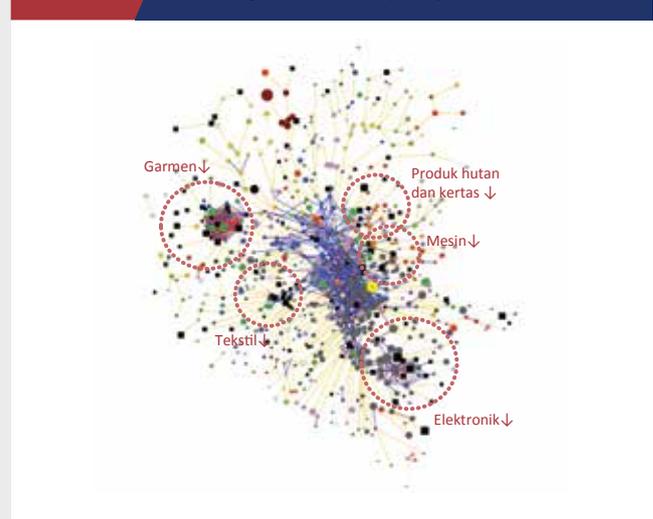
5 *Product space* terdiri atas titik simpul dan garis yang menghubungkan simpul. Titik simpul dengan warna berbeda mewakili klasifikasi produk Leamer (contoh SDA, padat karya, dan metalurgi) dengan ukuran simpul mewakili nilai perdagangan internasional produk tersebut. Warna garis mencerminkan tingkat kedekatan antar produk dimana warna merah dan biru tua menunjukkan kedekatan yang tinggi sedangkan kuning dan biru muda menggambarkan keterkaitan yang rendah. Yang membedakan *product space* tiap negara adalah titik hitam yaitu produk ekspor negara tersebut yang memiliki $RCA > 1$.

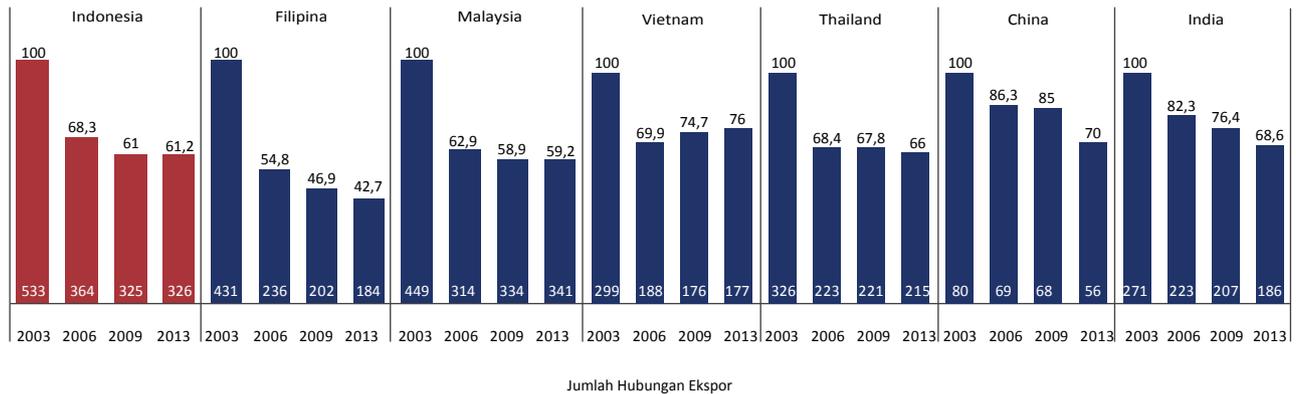
Grafik 4 Kecanggihan Produk (2001-2013)



otomotif. Sementara produk bernilai rendah berada di daerah yang jaringan keterkaitannya rendah. Suatu negara umumnya akan lebih mudah memproduksi barang yang dekat dengan produk yang sudah diproduksinya. Dengan demikian, negara yang memiliki keunggulan komparatif di kluster industri dengan keterkaitan tinggi akan lebih cepat melakukan *upgrading* terhadap produk ekspornya. Analisis *product space* Indonesia dari tahun 2000 hingga 2013 menunjukkan *product space* Indonesia semakin menjauh dari daerah inti yang memiliki keterkaitan tinggi. Hal tersebut terlihat dari penurunan jumlah produk berkeunggulan komparatif pada garmen dan tekstil serta mesin, elektronik, dan furnitur yang merupakan tendensi keunggulan komparatif pada *upper-middle countries*. Menurut Hidalgo *et al* (2007), daya saing rendah pada kluster industri ini akan menyulitkan transisi ke *income*

Grafik 5 Product Space Indonesia (2013)





group yang lebih tinggi yang berarti adanya risiko (*lower middle income trap*) bagi Indonesia.

Dimensi lainnya, yaitu *sustainability margin* diwakili oleh indikator kemampuan untuk mempertahankan hubungan perdagangan. Selama rentang tahun 2003-2013, pangsa hubungan ekspor baru Indonesia yang masih bertahan adalah sebesar 61,2% (Grafik 6). Durasi ekspor ini hanya lebih baik dibandingkan Filipina dan Malaysia, namun lebih rendah dibandingkan Vietnam, Thailand, China dan India.

Kinerja perdagangan Indonesia juga perlu dilihat dari aspek daya saing dalam rantai nilai dunia. Perkembangan perekonomian global pada abad 21 menunjukkan adanya perubahan pola perdagangan dari persaingan memproduksi produk tertentu menjadi persaingan terlibat dalam proses produksi, yaitu *manufacturing, pre-fabrication, ataupun post-fabrication*.⁶ Kemampuan

Indonesia terlibat dalam salah satu proses produksi tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh daya saing sebagai lokasi pilihan sesuai dengan karakteristik faktor input. Daya tarik investasi Indonesia perlu diperkuat untuk mendorong investasi berorientasi ekspor. Analisis perbandingan karakteristik FDI di antara negara ASEAN menunjukkan bahwa investasi di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, namun lebih berorientasi domestik. Sementara negara lain di kawasan dapat mengundang investasi yang lebih berkualitas seperti Thailand: FDI mendorong ekspor, Vietnam: FDI mendorong ekspor dan penyerapan tenaga kerja, dan Malaysia: FDI mendorong produk ekspor berbasis tenaga kerja terampil (Tabel 1).

Lebih jauh, hasil analisis dengan menggunakan pendekatan skema perdagangan segitiga (*triangular trading scheme*) menunjukkan bahwa negara ASEAN yang paling kompetitif dalam rantai nilai global adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Grafik 7).⁷ Ukuran kompetitif tersebut diperoleh berdasarkan tingkat produktivitas impor, yaitu kemampuan mengekspor setelah mengimpor bahan baku dan barang antara. Ukuran kompetitif juga mempertimbangkan skala ekspor dalam rantai nilai dunia.

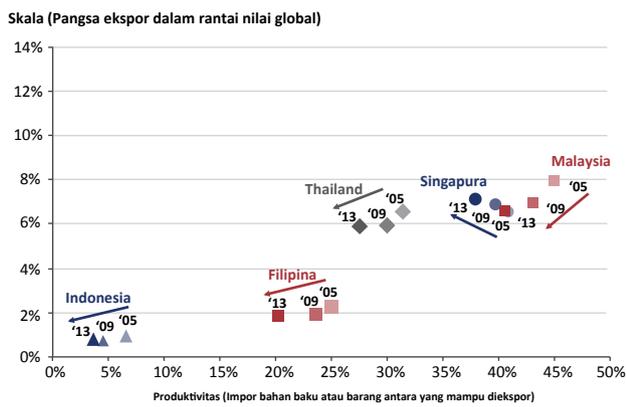
Tabel 1. Karakteristik FDI Negara ASEAN

Rasio Produktivitas	FDI/Perusahaan Terafiliasi (USD Juta)	Ekspor/Perusahaan Terafiliasi (USD Juta)	Tenaga Kerja/Perusahaan Terafiliasi
Indonesia	\$4,85	\$69,39	809
Vietnam	\$10,80	\$107,81	896
Malaysia	\$3,48	\$122,25	389
Thailand	\$6,10	\$204,24	709

6 Berdasarkan karakteristik nilai tambah dan faktor input, setiap tahapan produksi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk *smiley curve*.

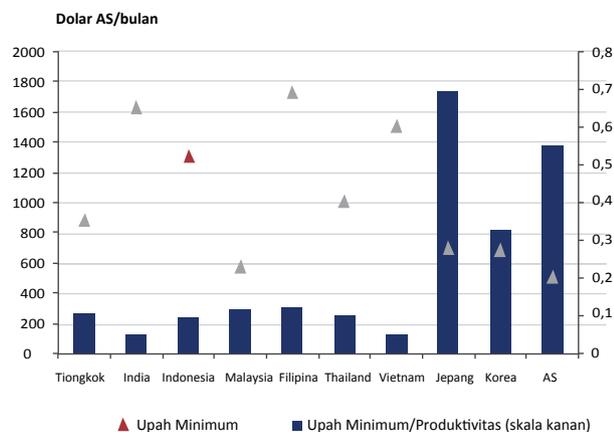
7 Konsep skema perdagangan segitiga mengacu pada Lejour et al (2013) dan Johnson-Noguera (2011). Berdasarkan metode tersebut, data perdagangan yang semula bersifat bilateral direkonstruksi menjadi perdagangan antara tiga negara, yaitu pemasok bahan baku (*origin*), penghubung (*hub*), dan tujuan akhir (*final destination*). Melalui pola perdagangan tiga negara tersebut diperoleh informasi antara lain: (1) Impor bahan baku yang diolah untuk ekspor (*production hub*) (2) Impor bahan baku yang diolah untuk domestik (3) Ekspor bahan mentah ke dunia (4) Ekspor produk olahan yang bahan bakunya dari domestik, dan (5) aktivitas berdikari (bersumber, diproses, dan dikonsumsi domestik).

Grafik 7. Daya Saing Negara ASEAN 5 Dalam Rantai Nilai Global



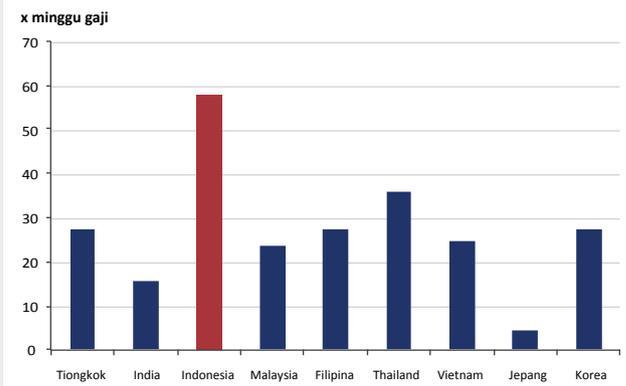
Tahap kedua analisa daya saing bertujuan untuk menganalisa daya saing faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja ekspor Indonesia. Daya saing diukur pada tiga dimensi yaitu akses pasar, faktor sisi suplai dan dukungan promosi perdagangan. Masing-masing dimensi ini membentuk kinerja ekspor melalui pengaruhnya terhadap perusahaan melalui jalur *entry cost*, biaya faktor dan transaksi yang menentukan daya saing produksi dari tingkat pabrika, serta tingkat teknologi dan efisiensi dari sektor atau perusahaan. Dari hasil analisis, tantangan pada ekspor Indonesia terjadi terutama disebabkan lemahnya daya saing tenaga kerja (*skill set*), biaya produksi dan logistik yang tinggi, tidak kondusifnya lingkungan bisnis dan rumitnya birokrasi terkait kebijakan dan institusi domestik, serta lemahnya akses pasar.

Grafik 8. Upah Minimum dan Produktivitas



Sumber: *World Development Indicators, World Bank, diolah*

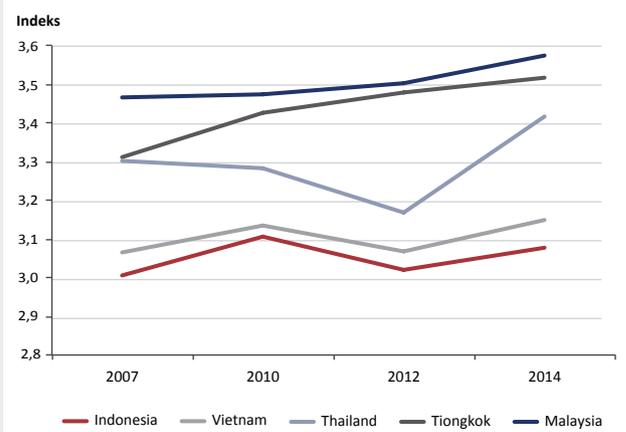
Grafik 9. Biaya Pemecatan



Sumber: *Global Competitiveness Index, WEF*

Dari dimensi faktor kondisi, terdapat biaya yang tinggi pada tenaga kerja Indonesia. Upah minimum dengan mempertimbangkan produktivitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara maju (Grafik 8). Upah minimum yang tinggi menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan pemindahan pabrik ke provinsi dengan UMR lebih rendah. Biaya pemecatan juga sangat tinggi dibandingkan *peers*, yaitu sekitar 50 kali gaji mingguan (Grafik 9). Selain itu, terdapat beberapa *implicit cost* seperti banyaknya serikat buruh yang menyulitkan proses negosiasi, banyaknya demonstrasi, serta meningkatnya risiko operasional. Dari sisi *skill*, terdapat permasalahan yang lebih serius. World Bank (2014) menyatakan bahwa terdapat *skill mismatch* dimana 50% lulusan SMA/setara dan 15% lulusan universitas bekerja di *unskilled position*.

Grafik 10. Logistics Performance Index



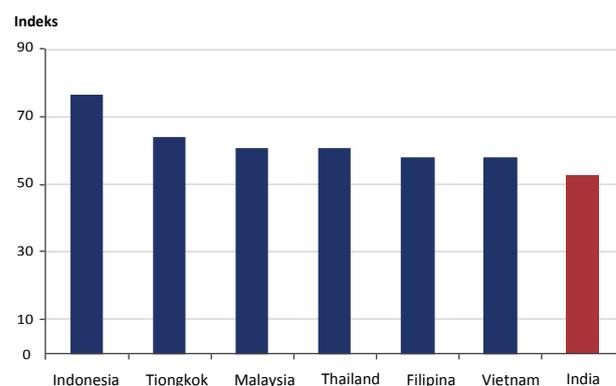
Sumber: World Bank

70% pengusaha manufaktur mengatakan sangat sulit untuk mengisi *skilled positions*. Sementara hanya 5% pekerja yang memperoleh *on-the-job formal training*.

Kondisi logistik Indonesia sangat menghambat perkembangan daya saing. Asosiasi Logistik dan *Forwarder* Indonesia (2015) menyebutkan biaya logistik Indonesia berkisar 24% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara Asia. Walaupun data WDI menunjukkan bahwa *Logistic Performance Index* Indonesia sedikit meningkat (Grafik 10), namun kondisinya masih lebih rendah dibandingkan *peers*. Isu lainnya dari faktor kondisi adalah kurangnya sertifikasi internasional dan *compliance* atas produk ekspor dan proses industri (Grafik 11).

Dari sisi kerangka insentif bagi pelaku usaha, kebijakan yang memudahkan FDI (Grafik 12) dan kemudahan berusaha Indonesia (Grafik 13) terendah di ASEAN. Beberapa aspek jauh lebih rendah dari *peers* seperti memulai usaha, berurusan dengan ijin konstruksi, mendaftarkan properti, membayar pajak dan menegakkan kontrak. Dari sisi akses pasar yaitu perjanjian perdagangan, Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam terlihat lebih unggul dari Indonesia. FTA Indonesia sebagian besar dilakukan dalam *regional trading system* ASEAN. Dalam *regional block trading*, Indonesia sedang melakukan negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang juga diikuti negara ASEAN lainnya dan tidak termasuk dalam *Trans Pacific Partnership* (TPP). Hambatan lainnya adalah *non-tariff measures* seperti *sanitary and phytosanitary* dan *technical barriers* yang dihadapi produk ekspor Indonesia.

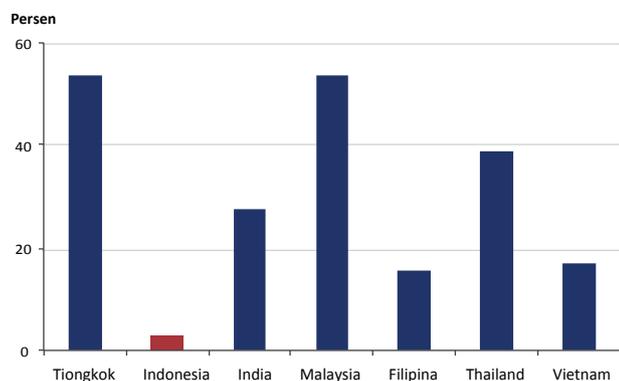
Grafik 12 Ease of Establishment Index (2014)



Sumber: Enterprise Surveys, World Bank

Dari sisi dukungan promosi perdagangan, promosi ekspor dan investasi Indonesia masih relatif lemah. Isu lainnya adalah pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang belum optimal. Jumlah KEK di Indonesia relatif setara dengan *peers* namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah ini masih lebih kecil (UNIDO, 2015). Selain itu, pengembangan KEK ini masih terbatas karena tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti integrasi dengan energi dan konektivitas. Beberapa KEK didirikan jauh dari infrastruktur pendukungnya seperti pelabuhan. Selain itu manajemen pengelolaan kawasan belum sepenuhnya efektif dengan dukungan promosi yang masih lemah.

Grafik 11 Persentase Perusahaan dengan Sertifikasi Internasional



Sumber: Enterprise Surveys, World Bank

Gambar 13 Kemudahan Berusaha Indonesia (2015)



Sumber: World Bank

STRATEGI INDUSTRI NASIONAL

Institusi dan Leadership	Skema insentif Trade dan Investment	SDM dan Ketenagakerjaan	Infrastruktur	Efisiensi Teknis dan Business Services	Akses Pembiayaan	Akses Pasar
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi (antar sektor, pusat-daerah) • Trust dan collective action • Efektivitas manajemen, pemerintahan dan tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi ekspor • Fasilitas investasi • Kawasan industri • Insentif fiskal • Lingkungan makro (inflasi terkendali dan nilai tukar yang stabil) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan sistem pendidikan nasional (<i>Link and Match</i>) • Keterampilan dan produktivitas kerja • Kebijakan Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas (jalan, logistik, pelabuhan, customs) • Energi & utilitas • Kebijakan fiskal logistik • Koordinasi dan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Technological improvement • R&D dan inovasi • Business services • HAKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pembiayaan (<i>financial inclusion</i>) • Modal ventura • Sumber pembiayaan jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Trade Agreement • Sertifikasi/standarisasi • Sistem informasi (<i>repository</i>) • Perluasan pasar dan sistem

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan peningkatan daya saing industri melalui *upgrading* dan *deepening* industri, penciptaan nilai tambah, serta industri yang berorientasi ekspor. Industri yang dimaksud adalah seluruh industri secara umum, baik yang berbasis SDA, padat karya, teknologi menengah maupun teknologi

tinggi. Untuk itu, diperlukan strategi industri nasional yang mencakup tujuh elemen dasar, yaitu: (i) Institusi dan *leadership*; (ii) Skema insentif perdagangan dan investasi; (iii) SDM dan ketenagakerjaan; (iv) Infrastruktur; (v) Efisiensi teknis dan *business services*; (vi) Akses pembiayaan; dan (vii) Akses pasar (Gambar 1).

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi struktural adalah menyusun strategi pertumbuhan yang dapat memberikan dampak signifikan pada perekonomian suatu negara sehingga perlu disusun strategi pembangunan berdasarkan prioritas yang mengacu pada hambatan utama. Reformasi struktural juga perlu memperhatikan aspek kewilayahan, karena setiap daerah dapat memiliki karakteristik sumber daya dan hambatan struktural yang berbeda.

Terkait hal di atas, Hausmann, Rodrik, dan Velasco (2005) telah memperkenalkan alternatif pendekatan *Growth Diagnostic* untuk melakukan identifikasi hambatan utama dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Analisis hambatan utama tersebut dilakukan dengan mendiagnosis setiap cabang pohon keputusan (*decision tree*), yang diawali dengan dua faktor utama, yaitu pembiayaan yang tinggi dan pengembalian ekonomi yang rendah (Gambar 1). Untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan hambatan utama tersebut, dilakukan proses simulasi kebijakan dengan menggunakan model *Computable General Equilibrium (CGE)-IndoTERM*.¹ Penggunaan model tersebut diperlukan untuk menganalisis dampak reformasi struktural terhadap makroekonomi daerah dan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Bank Indonesia (2015) melakukan studi *Growth Diagnostic* untuk 24 provinsi di Indonesia dengan memadukan analisis *decision tree* dan model CGE.²

Secara umum, hambatan utama di hampir seluruh wilayah Indonesia bersumber dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas dan reliabilitas listrik. Terkait sumber daya manusia, rata-rata lama sekolah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan KTI masing-masing adalah 8.6, 8.1, 8.1, dan 7.9 tahun, atau secara nasional masih di bawah 9 tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena Indonesia

membutuhkan banyak tenaga kerja teknis berpendidikan tinggi untuk bertransisi menjadi negara maju, khususnya dalam memperkuat struktur ekonomi pada sektor industri terkait teknologi menengah dan tinggi. Bagi kawasan luar Jawa, ketersediaan tenaga kerja ahli juga dibutuhkan untuk memperkuat diversifikasi sektor ekonomi bernilai tambah tinggi. Selama ini, fenomena kekurangan tenaga kerja ahli di kawasan luar Jawa dapat dilihat dari banyaknya penggunaan tenaga kerja dari wilayah lain. Lebih jauh, hasil analisis di beberapa provinsi juga menunjukkan bahwa umumnya tenaga kerja dengan pendidikan rendah berada di daerah pedesaan, dengan aktivitas utama di sektor pertanian. Kualitas tenaga kerja yang rendah di sektor pertanian tersebut dapat menghambat proses peningkatan produktivitas pertanian terutama untuk mencapai swasembada pangan. Tidak tercapainya swasembada atau berkurangnya pasokan pangan akan menyebabkan kenaikan harga pangan relatif terhadap barang industri. Tingginya harga bahan makanan sebagai kebutuhan pokok akan meningkatkan biaya hidup di kota, yang kemudian berujung pada tekanan kenaikan upah oleh pekerja industri. Hal ini pada akhirnya akan menghambat penyerapan tenaga kerja dan memengaruhi laju transformasi Indonesia menjadi negara industri. Kemudian, hasil simulasi kebijakan menggunakan model CGE-IndoTERM mengkonfirmasi identifikasi hambatan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil simulasi, peningkatan produktivitas melalui akselerasi pembangunan modal manusia berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh nusantara, khususnya dalam memperkuat sektor manufaktur unggulan di masing-masing wilayah (Grafik 2). Secara nasional, program kebijakan pembangunan modal manusia berpotensi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25% per tahun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,50% per tahun (deviasi dari skenario *baseline* tanpa kebijakan).³

Terkait listrik, kebutuhan rumah tangga untuk kawasan Jawa relatif tercukupi, namun populasi industri yang besar mendorong kebutuhan energi yang besar pula, sehingga kapasitas listrik masih perlu ditingkatkan. Sementara untuk kawasan luar Jawa, kekurangan energi listrik dirasakan oleh dunia usaha maupun rumah tangga. Selain itu, masih banyaknya jumlah perusahaan yang berusaha menyediakan pasokan listrik sendiri, menggambarkan bahwa kehandalan listrik juga masih

1 IndoTERM adalah model CGE antardaerah multisektor yang bersifat *bottom-up*, dibangun oleh kolaborasi dari beberapa institusi yaitu Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran Indonesia; Center for Policy Studies, Victoria University Australia; Asian Development Bank; AusAID; dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2 24 provinsi yang menjadi objek kajian *Growth Diagnostic* Bank Indonesia tahun 2015 adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

3 Selengkapnya lihat: Affandi dan Anugrah (2015) Strategi Pertumbuhan Indonesia: Pendekatan *Growth Diagnostic*.

Gambar 1. Pohon Keputusan *Growth Diagnostic*



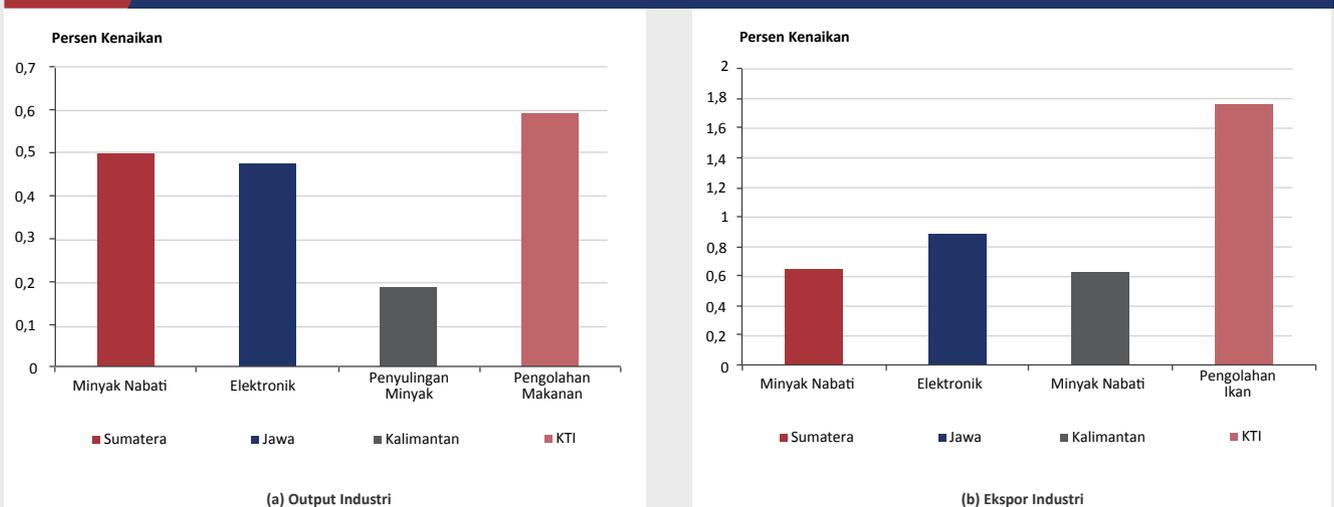
Sumber: Hausmann, Rodrik, dan Velasco (2005)

belum memadai. Berdasarkan hasil *World Bank Enterprise Survey* (2009), tingkat kerugian akibat pemadaman listrik di Indonesia dapat mencapai 1,6% nilai produksi. Hasil simulasi kebijakan menggunakan model CGE-IndoTERM juga mengkonfirmasi pentingnya pembangunan listrik. Berdasarkan hasil simulasi, kebijakan pembangunan kapasitas listrik berpotensi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,25% pertahun dan penyerapan tenaga kerja 0,13% pertahun (deviasi dari skenario *baseline* tanpa kebijakan). Pembangunan listrik juga berpotensi mendorong peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan peluang bagi masing-masing wilayah Indonesia untuk mengembangkan

industri unggulannya (Grafik 3). Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan infrastruktur listrik sangat dibutuhkan bagi dunia usaha, baik dalam melakukan ekspansi, maupun meningkatkan produktivitas dari potensi kerugian yang dihadapi saat ini.

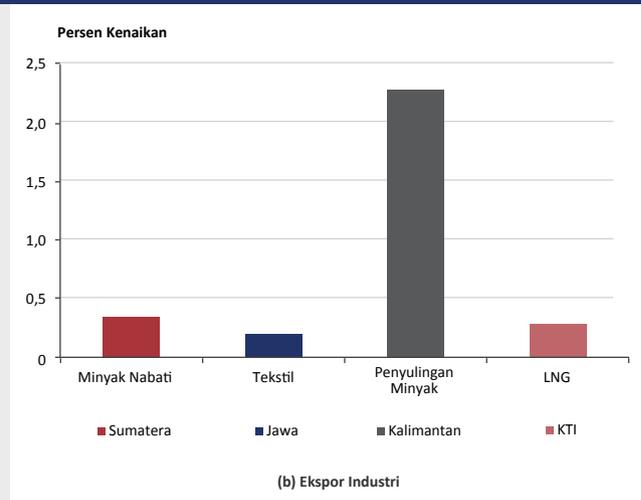
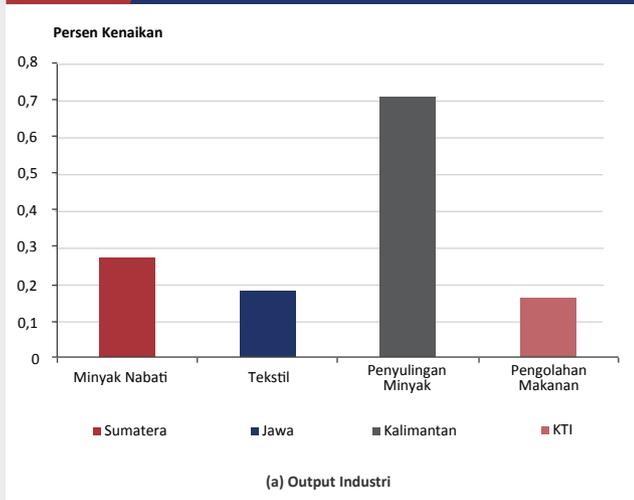
Selain modal manusia dan infrastruktur energi, konektivitas juga merupakan hambatan utama bagi banyak wilayah di Indonesia. Hambatan tersebut khususnya bersumber dari kapasitas dan kualitas pelabuhan, jalan dan bandara. Perbandingan waktu bongkar muat (*dwelling time*), waktu perputaran (*turnaround time*), dan kapasitas pelabuhan menggambarkan bahwa

Grafik 2. Dampak Pembangunan SDM di 4 Wilayah Indonesia (Industri yang mengalami kenaikan terbesar di masing-masing wilayah)



Grafik 3.

Dampak Pembangunan Listrik di 4 Wilayah Indonesia (Industri yang mengalami kenaikan terbesar di masing-masing wilayah)



efisiensi pelabuhan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara pesaing di ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Sementara terkait jalan, masih banyak industri yang merasa tingkat kerusakan cukup tinggi dan menghadapi banyak pungutan liar, termasuk di kawasan Jawa yang memiliki infrastruktur relatif lebih baik. Selain

itu, beberapa provinsi di Indonesia juga menghadapi hambatan lain yang cukup bervariasi, seperti masalah birokrasi dan keamanan. Permasalahan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, baik infrastruktur konektivitas (jalan, pelabuhan, dan rel kereta api) maupun infrastruktur energi listrik.



Keterangan gambar:

Masa depan senantiasa diwarnai dengan ketidakpastian. Namun demikian, masa depan juga menjanjikan harapan bagi mereka yang berusaha. Perekonomian Indonesia memiliki potensi untuk bertumbuh lebih tinggi dan memiliki fondasi yang lebih kokoh.



Bab 16

Prospek Perekonomian

Prospek ekonomi ke depan diperkirakan tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari komitmen untuk mempercepat pelaksanaan reformasi struktural secara berkelanjutan, konsisten, dan tersinergi antarsektor. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bertumpu pada permintaan domestik yang ditopang oleh investasi dari proyek infrastruktur. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi akan meningkat sejalan dengan dampak proyek infrastruktur terhadap peningkatan kapasitas perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan ke depan akan tetap terjaga.

Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang terbatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diperkirakan tetap berada dalam tren meningkat sejalan dengan implementasi reformasi struktural. Secara keseluruhan prospek perekonomian global diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya walaupun masih terbatas. Perekonomian dunia diperkirakan akan mulai menunjukkan perbaikan terutama dari negara maju, khususnya ekonomi Amerika Serikat. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok diperkirakan masih akan mengalami perlambatan yang berdampak pada masih tertahannya pertumbuhan harga komoditas. Dengan prospek perekonomian global tersebut, laju perekonomian Indonesia ke depan juga sangat ditentukan oleh implementasi reformasi struktural yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia memprakirakan prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2016 akan meningkat dengan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2-5,6% dan laju inflasi yang terkendali menuju sasaran yang ditetapkan sebesar $4\pm 1\%$. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pertumbuhan kredit diperkirakan sebesar 12-14%. Adapun defisit transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 sejalan dengan intensifnya proyek-proyek infrastruktur, namun tetap pada level yang aman, yakni di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap meningkat dan lebih berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan dapat mencapai 6,3-6,8%. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil ditunjang oleh bertambahnya porsi kelas menengah dan perluasan perlindungan sosial. Investasi tumbuh meningkat sejalan dengan terealisasinya proyek-proyek infrastruktur dan perbaikan iklim usaha. Kualitas pengeluaran pemerintah akan meningkat dengan belanja modal yang lebih intensif sejalan dengan penurunan pangsa untuk keperluan subsidi. Selain itu, alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBN akan semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya guna mencapai pembangunan yang lebih merata diseluruh daerah. Implementasi program reformasi struktural akan menentukan kapasitas dan kapabilitas sisi produksi untuk memungkinkan perekonomian tumbuh lebih kuat, berkelanjutan dan inklusif.

16.1. PROSPEK PEREKONOMIAN JANGKA PENDEK

Prospek Perekonomian Global

Kinerja perekonomian global akan membaik meskipun terbatas. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 3,4% dengan ditopang oleh perbaikan ekonomi AS yang terus berlangsung. Perbaikan ekonomi AS didukung oleh konsumsi yang meningkat seiring dengan peningkatan kinerja sektor tenaga kerja dan masih rendahnya harga minyak. Meski cenderung solid, namun dengan mempertimbangkan beberapa risiko yang masih membayangi perekonomian AS, normalisasi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) pada tahun 2016 diperkirakan akan gradual. Sementara itu, perbaikan ekonomi di Eropa mulai terlihat pada sisi permintaan yang didukung dengan kebijakan moneter yang akomodatif. Perbaikan terutama didorong oleh peningkatan konsumsi dan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, masih berlanjutnya langkah kebijakan *Quantitative Easing* (QE) dari Bank Sentral Eropa diperkirakan dapat mengurangi sebagian dari pengaruh kebijakan the Fed terhadap pergerakan arus modal global ke *emerging markets*. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok diperkirakan melambat seiring proses *rebalancing* yang masih berlangsung. Sejalan dengan pola pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan masih belum merata, volume perdagangan dunia diperkirakan hanya tumbuh moderat pada tahun 2016.

Pertumbuhan harga komoditas global diperkirakan masih berada pada level yang negatif. Penurunan harga komoditas mengindikasikan telah berakhirnya era *super-cycle* harga komoditas global yang disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang terutama Tiongkok yang selama ini menjadi pembeli utama komoditas global. Selain itu, harga minyak dunia masih akan berada pada level yang rendah seiring dengan pemulihan ekonomi dunia yang terbatas serta masih melimpahnya pasokan minyak dunia.

Prospek Perekonomian Domestik

Prospek PDB Permintaan

Permintaan domestik masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Permintaan domestik diperkirakan dapat membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,6% di tengah terbatasnya pemulihan kondisi eksternal. Secara keseluruhan,

konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,0-5,4% pada tahun 2016 (Tabel 16.1). Percepatan reformasi struktural melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah kesempatan kerja. Kenaikan upah buruh dan pembayaran gaji ke 14 untuk PNS, TNI/POLRI dan pensiunan turut mendorong pertumbuhan pendapatan. Selain dari sisi penghasilan, terjaganya daya beli masyarakat juga didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga pada kisaran target 4±1%.

Tabel 16.1. Proyeksi PDB Sisi Permintaan

Variabel	Realisasi 2015	Proyeksi 2016
Pertumbuhan PDB (% yoy)	4,8	5,2-5,6
Konsumsi Rumah Tangga*	4,8	5,0-5,4
Konsumsi Pemerintah	5,4	6,4-6,8
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,1	7,2-7,6
Ekspor Barang dan Jasa	-2,0	-5,5 - (-5,1)
Impor Barang dan Jasa	-5,8	-5,1 - (-4,7)

Sumber : BPS (diolah)
 * Penggabungan 2 Jenis Pengeluaran : (i) Konsumsi Rumah Tangga; (ii) Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga

Investasi tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan investasi pada tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai 7,2-7,6%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Investasi bangunan masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan investasi ke depan. Hal ini terutama didasari oleh semakin membaiknya implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dengan memperbesar alokasi belanja yang

produktif. Alokasi belanja produktif akan difokuskan pada peningkatan modal dasar pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Pertumbuhan investasi swasta juga diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan mulai kuatnya permintaan domestik dan perkiraan mulai meningkatnya permintaan eksternal untuk produk ekspor Indonesia. Peningkatan peran swasta juga ditopang oleh kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih akomodatif.

Pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Untuk mempercepat realisasi rencana pemerintah, 225 proyek yang sudah memiliki *pre-feasibility study* dan bernilai di atas Rp100 miliar sudah ditetapkan pemerintah sebagai PSN (Diagram 16.1). Dari 225 proyek tersebut, Pemerintah menugaskan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) untuk mempercepat pembangunan 30 proyek infrastruktur yang sebagian besar berpotensi untuk didanai melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Dari 30 proyek prioritas telah terdapat 13 proyek yang telah melalui tahap tender dan beberapa proyek telah masuk dalam tahap konstruksi (Diagram 16.2). Untuk mendukung keberhasilan implementasi PSN, Pemerintah mengeluarkan Perpres No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memberikan fasilitas dan kemudahan terkait dengan perizinan, pengadaan, penyediaan lahan, serta jaminan dari Pemerintah. Untuk infrastruktur ketenagalistrikan, diberikan fasilitas tambahan selain yang telah tertera dalam perpres PSN, yang tertuang dalam Perpres No.4 tahun 2016, untuk mempermudah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Perpres ini mengatur mengenai

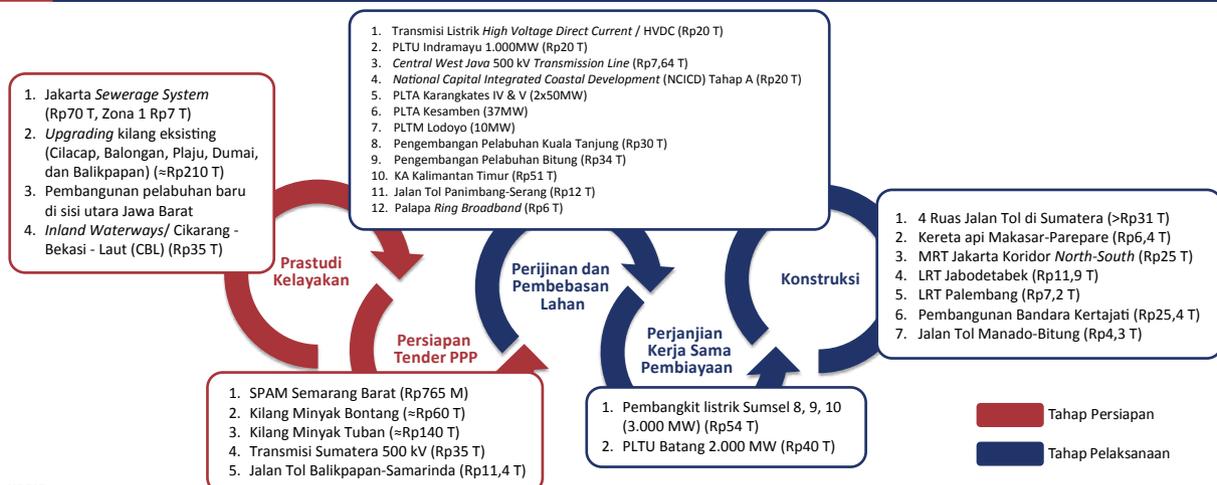
Diagram 16.1. Proyek Strategis Nasional



	Jalan	Rel Kereta	Bandara	Pelabuhan	Perumahan	Energi	Listrik
PSN	52	19	17	13	3	7	402
Proyek Prioritas	4	5	1	4	-	3	9
	SPAM	Bendungan	Pertanian dan Perikanan	PLBN	ICT	KEK	
PSN	10	60	3	7	3	25	
Proyek Prioritas	3	-	-	-	1	-	

Sumber: KPPPIP

Diagram 16.2. Perkembangan Proyek Prioritas



kepastian wewenang PLN sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, bantuan pendanaan dari Kementerian Keuangan, BUMN, dan ESDM, perlindungan hukum, serta keleluasaan PLN dalam mencari pendanaan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan disertai jaminan dari Pemerintah.

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekspor tahun 2016 diperkirakan masih tumbuh negatif. Kurang baiknya kinerja ekspor sejalan dengan perkiraan berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok, yang merupakan salah satu pasar utama ekspor Indonesia. Sejalan dengan itu, harga komoditas ekspor utama juga diperkirakan masih mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Walaupun beberapa negara tujuan ekspor utama Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan, namun tidak cukup untuk mengimbangi penurunan permintaan barang ekspor Indonesia secara keseluruhan. Ekspor riil Indonesia tahun 2016 diperkirakan tumbuh sekitar -5,5 – (-5,1%).

Pertumbuhan impor diperkirakan tidak berbeda signifikan dengan tahun sebelumnya. Dengan permintaan domestik yang meningkat di tengah ekspor yang masih mengalami pertumbuhan negatif, pertumbuhan impor tahun 2016 diperkirakan mencapai -5,1 – (-4,7%). Masih lemahnya impor, di tengah peningkatan investasi, disebabkan oleh sumber peningkatan investasi terbesar adalah investasi bangunan/infrastruktur. Mengingat bahwa elastisitas impor dari investasi bangunan/infrastruktur tidak sebesar elastisitas investasi mesin/peralatan, dampak dari kenaikan investasi terhadap impor relatif terbatas. Selain itu, kecenderungan penurunan impor bahan baku pada awal 2016 juga didorong oleh belum beroperasinya kegiatan manufaktur Indonesia pada kapasitas yang tinggi.

Prospek PDB Lapangan Usaha

Berdasarkan sisi produksi, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama sejalan dengan permintaan domestik yang membaik, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor konstruksi. Pada tahun 2016, ketiga sektor tersebut masih menjadi tumpuan perekonomian, terutama sektor konstruksi seiring dengan implementasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh mencapai 4,8 – 5,2% pada tahun 2016 sejalan dengan mulai pulihnya permintaan domestik (Tabel 16.2). Relatif terbatasnya pertumbuhan di sektor ini sejalan dengan prospek harga komoditas global yang masih rendah sehingga berpotensi menjadi disinsentif bagi eksportir barang industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Di sisi lain, pertumbuhan sektor ini turut didukung oleh subsektor industri barang dari logam yang terkait dengan investasi pemerintah di bidang infrastruktur.

Sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tetap melanjutkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor ini diperkirakan dapat tumbuh sebesar 9,2-9,6% pada tahun 2016. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perkiraan realisasi proyek-proyek pengembangan terminal, pelabuhan, bandara, serta penyediaan moda-moda transportasi oleh pemerintah sebagai bagian dari rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah. Dalam konteks ini, Pemerintah antara lain akan melakukan pengadaan sekitar 1.050 *Bus Rapid Transit* (BRT) untuk 32 provinsi, pembangunan 10 unit kapal perintis, pengadaan 3 unit kapal ferry lintas Merak-Bakauheni, pengembangan 34 bandara besar dan kecil di 17 provinsi, dan pengembangan 40 pelabuhan di 14 provinsi. Pada akhir tahun 2016, terminal 3 *Ultimate* Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan

Tabel 16.2.

Proyeksi PDB Sisi Lapangan Usaha

Variabel	Realisasi	Proyeksi
	2015	2016
Pertumbuhan PDB (% yoy)	4,8	5,2-5,6
Pertanian	4,0	3,4-3,8
Pertambangan dan Penggalian	-5,1	-6,6 - (-6,2)
Industri Pengolahan	4,2	4,8-5,2
Listrik, Gas, dan Air Bersih*	1,6	3,3-3,7
Bangunan	6,6	8,7-9,1
Perdagangan, Hotel, dan Restoran**	2,8	4,1-4,5
Pengangkutan dan Komunikasi***	8,5	9,2-9,6
Kuangan, Persewaan, dan Jasa****	7,0	8,8-9,2
Jasa-jasa*****	6,5	7,0-7,4

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Indonesia

* Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas; (ii) Pengadaan air

** Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; (ii) Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum

*** Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan; (ii) Informasi dan Komunikasi

**** Penggabungan 3 lap. usaha: (i) Jasa Keuangan; (ii) Real Estate; (iii) Jasa Perusahaan

***** Penggabungan 4 lap. usaha: (i) Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; (ii) Jasa Pendidikan; (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya; (iv) Jasa Lainnya.

sudah mulai beroperasi. Proyek ini akan mendorong meningkatnya daya angkut transportasi udara sekaligus stimulus untuk moda transportasi lainnya. Sementara itu, sejalan dengan strategi penguatan konektivitas nasional, Pemerintah juga akan mengembangkan sistem angkutan massal, termasuk angkutan massal cepat berbasis rel dan pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan.

Meningkatnya kebutuhan di bidang data dan komunikasi akan mendorong pertumbuhan subsektor komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan ekspansi kelas menengah yang terus berlanjut, kebutuhan akan jaringan komunikasi membuat kebutuhan terhadap data dan *traffic* komunikasi akan terus bertambah. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan *broadband* di Indonesia melalui peninjauan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah sulit terjangkau. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi yang baru, yaitu 4G, dengan kecepatan *download* dan *upload* yang besar diperkirakan akan mendorong penggunaan data yang semakin besar di Indonesia. Akselerasi pembangunan infrastruktur di bidang *Information and Communication Technology* (ICT) akan meningkatkan perkembangan ekonomi digital di tanah air. Perkembangan ekonomi digital ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi ke depan (lihat Boks 16.1).

Sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh menguat menjadi 8,7-9,1% pada tahun 2016. Perkembangan sektor ini terutama ditopang oleh semakin terakselerasinya proyek-proyek infrastruktur setelah diterbitkannya

Perpres No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Setelah sempat tertunda pada tahun 2015 karena proses konsolidasi di pemerintahan, Pemerintah pada tahun 2016 semakin meningkatkan dan mempercepat berbagai proses tender dan pengadaan serta memulai konstruksi proyek-proyek yang tersebar di delapan sektor. Sektor-sektor tersebut ialah sektor perhubungan udara, telekomunikasi dan informatika, perhubungan laut, perkeretaapian, ketenagalistrikan dan energi, perhubungan darat dan jalan, perumahan pemukiman dan cipta karya, serta sumber daya air. Sementara itu, beberapa proyek yang telah dimulai antara lain termasuk pembangunan Terminal 3 *Ultimate* Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan bandara Kertajati Majalengka, pengembangan bandara Ahmad Yani Semarang, pembangunan terminal Kalibaru Priok, pembangunan terminal *multi purpose* Teluk Lamong, pembangunan tol Trans Jawa (Cikampek-Palimanan, Bawen-Salatiga, dan Solo-Ngawi-Kertosono), serta pembangunan tol Trans Sumatera (Bakauheni-Tegineneng, Pekanbaru-Dumai, dan Kayuagung-Betung).

Prospek PDB Regional

Prospek perekonomian di berbagai daerah pada tahun 2016 secara agregat lebih baik dibanding tahun 2015, terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perekonomian Jawa diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,6–6,0%, didorong oleh meningkatnya kinerja investasi yang bersumber dari ekspansi pembangunan infrastruktur pemerintah, baik infrastruktur pertanian (waduk, embung, dan jaringan irigasi) maupun infrastruktur pendukung konektivitas (jalan, jalur rel kereta, pelabuhan, maupun bandara). Di samping itu, berlanjutnya perbaikan konsumsi dan ekspor manufaktur turut mendorong peningkatan ekonomi Jawa seiring dengan membaiknya ekspektasi pendapatan masyarakat dan permintaan dari negara tujuan ekspor produk manufaktur. Sementara itu, perekonomian Sumatera diperkirakan tumbuh di kisaran 4,2-4,7%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera juga diperkirakan terkait dengan realisasi proyek infrastruktur berskala besar seperti pembangunan jalan Trans Sumatera, pembangkit listrik, dan sarana penunjang kegiatan Asian Games 2018. Perekonomian Kalimantan pada 2016 diperkirakan tumbuh membaik meskipun masih berada pada kisaran yang rendah yakni 2,1-2,5%. Membaiknya perekonomian Kalimantan ditopang oleh peningkatan kinerja industri pengolahan seiring dengan berlanjutnya upaya hilirisasi di beberapa daerah (*smelter* dan industri turunan CPO), disamping perbaikan kinerja pertanian dan pertambangan. Namun, perbaikan ekonomi Kalimantan diperkirakan tertahan oleh prospek

harga komoditas pertambangan yang masih rendah. Di sisi lain, perekonomian KTI pada 2016 diperkirakan tumbuh di kisaran 7,1-7,5%, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 karena masih terbatasnya kinerja ekspor pertambangan dan investasi swasta.

Prospek Inflasi

Inflasi tahun 2016 diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi sebesar 4±1%. Tekanan inflasi inti tahun 2016 diperkirakan moderat dan tetap terkendali. Dari sisi eksternal, faktor yang memengaruhi inflasi inti relatif terjaga dengan mempertimbangkan terjaganya volatilitas nilai tukar dan masih rendahnya harga komoditas nonmigas internasional. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat direspons sisi penawaran tanpa menyebabkan tekanan ke inflasi yang signifikan. Ekspektasi inflasi diperkirakan masih tetap terjaga sejalan dengan dukungan kebijakan dan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan relatif moderat.

Inflasi dari kelompok *volatile food* pada tahun 2016 diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Inflasi *volatile food* yang meningkat tersebut terkait dengan permintaan domestik yang tetap kuat dan adanya potensi pergeseran musim tanam. Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) mengemukakan bahwa puncak paceklik padi yang biasanya setiap tahun terjadi pada Januari-Februari bisa menjadi lebih lama yaitu menjadi Januari-Maret pada awal 2016 akibat *El Nino*. Minimnya curah hujan pada Oktober 2015 menyebabkan petani, terutama petani tadah hujan, tidak bisa menanam. Dengan kondisi tersebut, panen pada bulan Februari 2016 akan lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya karena mundurnya musim tanam. Untuk meredam tekanan inflasi *volatile food* dalam periode mendatang, perlu adanya penguatan stok serta peningkatan produksi untuk menjaga pergerakan harga komoditas bahan makanan.

Inflasi kelompok *administered prices* (AP) 2016 secara rata-rata diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dengan skema penetapan harga energi yang lebih fleksibel mengikuti harga pasar dan asumsi harga minyak dunia pada tahun 2016 yang diperkirakan akan lebih rendah dari tahun sebelumnya, inflasi kelompok AP diperkirakan akan relatif rendah. Namun dengan mempertimbangkan masih berlanjutnya reformasi subsidi, tidak tertutup kemungkinan ke depan masih akan terdapat penyesuaian terhadap harga-harga komoditas yang diatur oleh

Pemerintah seperti tarif tenaga listrik dan harga gas LPG bersubsidi.

Prospek Neraca Pembayaran

Defisit neraca transaksi berjalan pada 2016 diperkirakan berada di bawah 3% PDB. Defisit transaksi berjalan tersebut terkait dengan peningkatan impor nonmigas yang didorong oleh aktivitas perekonomian domestik. Pada 2016, meskipun permintaan dunia mengalami peningkatan, berlanjutnya koreksi harga komoditas dan harga minyak dunia yang tetap rendah menyebabkan tertahannya peningkatan kinerja ekspor. Di sisi lain, impor barang nonmigas diperkirakan meningkat sejalan dengan pertumbuhan permintaan domestik terutama terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

Prospek harga minyak dunia yang menurun pada tahun 2016 diperkirakan berdampak negatif terhadap prospek ekspor migas. Penurunan harga minyak dunia ini berpotensi mengurangi investasi migas sehingga dapat memperburuk *lifting* migas yang sedang mengalami penurunan akibat usia sumur yang menua (*natural declining*). Kondisi ini akan menurunkan ekspor migas yang berdampak pada tertekannya neraca perdagangan migas. Dari sisi impor, volume impor minyak diperkirakan akan meningkat sejalan dengan penambahan konsumsi BBM namun dengan nilai yang menurun akibat perkiraan harga minyak dunia yang rendah. Secara keseluruhan defisit neraca perdagangan migas diperkirakan sedikit menurun.

Neraca transaksi modal dan finansial (TMF) diperkirakan akan mengalami peningkatan surplus. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya arus masuk dana asing melalui investasi langsung dan berkurangnya defisit investasi lainnya. Peningkatan surplus investasi asing langsung tersebut sejalan dengan peningkatan perkiraan PMTB yang didukung oleh membaiknya fundamental ekonomi. Sementara itu, berkurangnya defisit investasi lainnya terutama disebabkan oleh penurunan penempatan simpanan sektor swasta di perbankan luar negeri. Di sisi lain, kenaikan FFR berdampak terhadap menurunnya aliran masuk modal nonresiden. Perbaikan surplus neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan mampu membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga *overall balance* NPI kembali mencatat surplus.

Prospek Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2016 diperkirakan tetap terkendali, ditopang oleh ketahanan perbankan

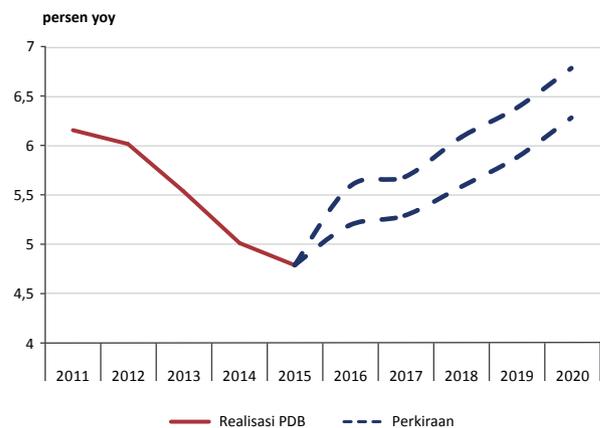
yang tetap terjaga dan kinerja pasar keuangan yang membaik. Rasio kecukupan modal diperkirakan masih tinggi, di atas ketentuan minimum 8%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah diperkirakan tetap rendah dan stabil. Likuiditas perbankan diperkirakan semakin membaik seiring dengan operasi keuangan pemerintah yang lebih ekspansif. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit diperkirakan akan meningkat sehingga mencapai, masing-masing, sebesar 13-15% dan 12-14%. Kisaran proyeksi pertumbuhan kredit tersebut masih konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia akan terus mendorong peran aktif perbankan dalam mendukung upaya pengelolaan ekonomi ke arah yang lebih sehat melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, pasar saham maupun SBN diperkirakan akan mencatatkan kinerja yang membaik sejalan dengan positifnya persepsi investor terhadap perbaikan fundamental dan prospek ekonomi Indonesia ke depan.

16.2. PROSPEK PEREKONOMIAN JANGKA MENENGAH

Dalam jangka menengah hingga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada dalam tren yang meningkat. Prakiraan ini didukung oleh membaiknya prospek perekonomian global yang disertai dengan dampak berbagai kebijakan struktural yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi jangka menengah akan dapat mencapai 6,3-6,8% pada tahun 2020 (Grafik 16.1). Dari sisi domestik, investasi tumbuh sejalan dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, iklim usaha yang membaik, reformasi birokrasi, dan FDI yang meningkat. Pengeluaran pemerintah yang lebih mengarah pada belanja modal dan penguatan efisiensi alokasi subsidi juga berkontribusi meningkatkan investasi. Implementasi berbagai program perbaikan struktural dan rangkaian paket kebijakan akan mendorong peningkatan produktivitas sehingga memperkuat sisi produksi yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan impor barang antara dan barang modal. Kondisi tersebut akan membuat volatilitas rupiah lebih terjaga dan mendukung tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil (Grafik 16.2).

Konsumsi rumah tangga dalam jangka menengah diperkirakan terus meningkat. Tren tersebut didukung oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif sehingga akan meningkatkan jumlah angkatan kerja sekaligus menurunkan rasio ketergantungan (Grafik 16.3). Selain itu, tren penurunan tingkat kemiskinan yang tetap

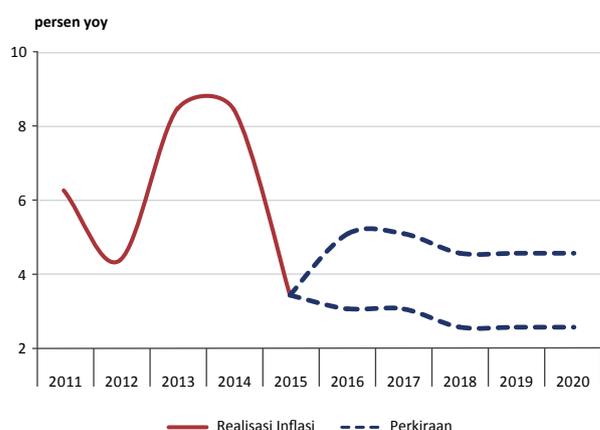
Grafik 16.1. Proyeksi PDB 2016-2020



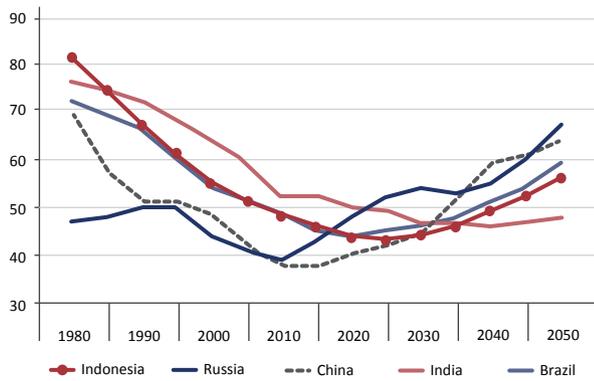
berlanjut dan meningkatnya jumlah kelas menengah akan meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Disamping itu, kontribusi ekspor yang diperkirakan membaik akan menambah daya beli masyarakat melalui penghasilan ekspor sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat ditopang oleh naiknya pendapatan pemerintah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan.

Pertumbuhan investasi dalam jangka menengah terkait erat dengan reformasi struktural yang sedang berlangsung. Perwujudan dari reformasi struktural yang sangat penting adalah pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan pemerintah. Berbagai infrastruktur yang saat ini sedang

Grafik 16.2. Proyeksi Inflasi 2016 – 2020



Grafik 16.3. *Dependency Ratio* Indonesia dan Beberapa Negara Kawasan

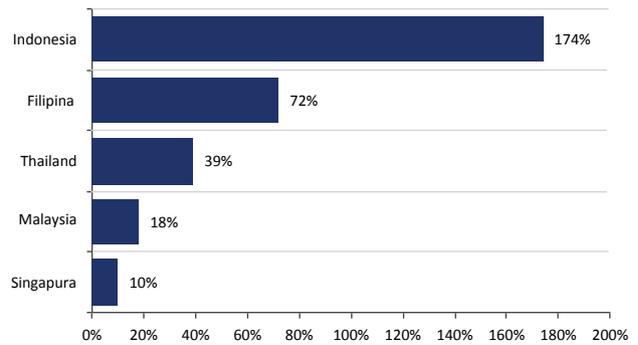


Sumber: UN-DESA, diolah

dibangun di berbagai kawasan Indonesia diperkirakan dapat menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah, khususnya di luar Jawa. Selain itu, reformasi struktural juga dilakukan melalui perbaikan iklim investasi yang diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi di Indonesia serta meningkatkan kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tercermin dari berbagai paket kebijakan pendukung perbaikan iklim investasi yang telah diterbitkan. Hasil survei dari beberapa institusi internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi yang mengindikasikan daya saing Indonesia yang terus membaik. Selain itu, pasar Indonesia yang besar dan terus tumbuh, khususnya kelas menengah, juga menjadi daya tarik untuk kegiatan investasi (Grafik 16.4). Untuk memenuhi semakin membesarnya jumlah dan ragam permintaan barang dan jasa baik untuk keperluan domestik maupun ekspor, investasi perlu tumbuh dengan proporsi yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi di sektor UMKM dan di luar Jawa berpotensi besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pertumbuhan ekspor diperkirakan akan membaik sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi mitra dagang yang membaik, harga komoditas yang tumbuh positif, serta peningkatan kemampuan untuk memproduksi barang ekspor yang lebih bervariasi, kontribusi ekspor dalam pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat. Walaupun beberapa negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti Tiongkok dan Eropa, diperkirakan memasuki tren pertumbuhan yang lebih rendah, beberapa negara dan kawasan tujuan utama ekspor Indonesia, seperti AS, Jepang, dan India, diperkirakan berada dalam

Grafik 16.4. *Pertumbuhan Kelas Menengah*



Sumber: AC Nielsen

tren pertumbuhan yang meningkat. Disamping itu, beroperasinya smelter, ekspor mineral, dan olahan bahan tambang diperkirakan berdampak positif terhadap ekspor terkait dengan nilai tambahnya yang lebih tinggi. Dengan langkah-langkah peningkatan daya saing, termasuk nilai tukar yang tetap kompetitif, inflasi yang terjaga, serta diversifikasi pasar dan produk, pertumbuhan ekspor dalam jangka menengah diperkirakan akan meningkat.

Impor diperkirakan meningkat sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi. Dengan perkiraan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi, pertumbuhan impor barang modal dalam bentuk mesin dan perlengkapan juga diperkirakan meningkat. Selain itu, kegiatan produksi yang semakin meningkat untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri akan mendorong permintaan impor bahan baku. Impor barang konsumsi diperkirakan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Tingkat inflasi dalam jangka menengah diperkirakan stabil dan terjaga di kisaran $3,5 \pm 1\%$ pada tahun 2020. Tekanan inflasi dari sisi eksternal cenderung moderat. Hal ini sejalan dengan perkiraan peningkatan harga komoditas internasional yang diperkirakan masih terbatas dalam jangka menengah dan volatilitas pergerakan nilai tukar yang rendah. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan dapat direspons oleh sisi penawaran yang membaik sejalan dengan dampak reformasi struktural terhadap meningkatnya kapasitas perekonomian. Dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan relatif minimal. Selain itu, ekspektasi inflasi akan tetap terjaga sejalan dengan melalui implementasi kebijakan moneter yang konsisten dengan target inflasi yang ditetapkan yang ditopang oleh penguatan koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Kinerja NPI dalam jangka menengah diperkirakan akan membaik dengan defisit transaksi berjalan yang sehat dan berada pada level yang berkelanjutan. Perbaikan tersebut terutama bersumber dari ekspor nonmigas yang diperkirakan semakin membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan kembali positifnya pertumbuhan harga komoditas nonmigas. Di sisi lain, peningkatan permintaan domestik dan ekspor serta pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal. Dari sisi migas, prospek harga minyak yang kembali meningkat secara gradual berdampak pada penerimaan ekspor minyak yang membaik. Namun demikian, peningkatan tersebut semakin terbatas didorong oleh penurunan produksi secara natural akibat usia sumur yang menua. Ekspor gas diperkirakan tetap naik sejalan dengan asumsi produksi gas yang meningkat, meskipun terdapat kewajiban pemenuhan kebutuhan migas untuk dalam negeri sebesar 25% dari produksi migas. Sementara itu, impor minyak diperkirakan terus meningkat seiring dengan penambahan kelas menengah yang mendorong peningkatan konsumsi BBM.

Neraca TMF diperkirakan semakin membaik dan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Fundamental perekonomian yang membaik, sebagai hasil dari implementasi kebijakan reformasi struktural pemerintah, berpeluang mendorong arus modal masuk, baik investasi langsung (FDI) maupun portofolio. Dengan meningkatnya arus masuk modal asing, peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan akan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, dengan kondisi defisit transaksi berjalan yang terkendali dan surplus pada neraca TMF, Neraca Pembayaran Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan mengalami surplus.

Faktor Risiko

Ke depan, masih terdapat beberapa faktor risiko yang dapat berdampak negatif pada prospek perekonomian. Dari sisi eksternal, masih terbatasnya dan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi global dapat menahan pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan, terutama dari sisi perdagangan. Dengan komposisi ekspor saat ini, pertumbuhan ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh permintaan dari negara berkembang, khususnya Tiongkok. Apabila pertumbuhan negara-negara tersebut melambat lebih dalam dari perkiraan, kinerja ekspor Indonesia dapat mencatat pertumbuhan yang lebih rendah. Pertumbuhan ekspor yang lebih rendah tersebut tidak hanya dari sisi volume, namun juga dari sisi nilai mengingat dinamika pertumbuhan ekonomi dunia juga memengaruhi harga komoditas internasional.

Harga komoditas internasional yang lebih rendah juga berpotensi mengakibatkan penurunan output potensial. Apabila struktur ekspor Indonesia di masa mendatang tetap didominasi sektor komoditas, terdapat risiko terbatasnya pertumbuhan output potensial Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan investasi yang melambat akibat prospek harga komoditas yang rendah. Dengan pertumbuhan output potensial yang terbatas, terdapat risiko peningkatan inflasi yang signifikan di saat pertumbuhan ekonomi meningkat.

Dari pasar keuangan global, meskipun peningkatan FFR diperkirakan lebih gradual, masih terdapat risiko terkait ketidakpastian kebijakan normalisasi lanjutan. Di satu sisi, masih belum jelasnya konsistensi dari perbaikan ekonomi di AS mengisyaratkan bahwa kenaikan FFR akan bersifat gradual. Namun di sisi lain, ketidakpastian tersebut juga dapat meningkatkan persepsi risiko dari para investor. Risiko perilaku *risk on-risk off* investor tersebut pada gilirannya dapat memengaruhi volatilitas aliran modal. Dengan aliran modal asing yang berfluktuasi, tingkat volatilitas nilai tukar juga akan meningkat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan tertundanya investasi, meningkatnya inflasi domestik, serta dapat meningkatkan risiko pada *balance sheet* perusahaan.

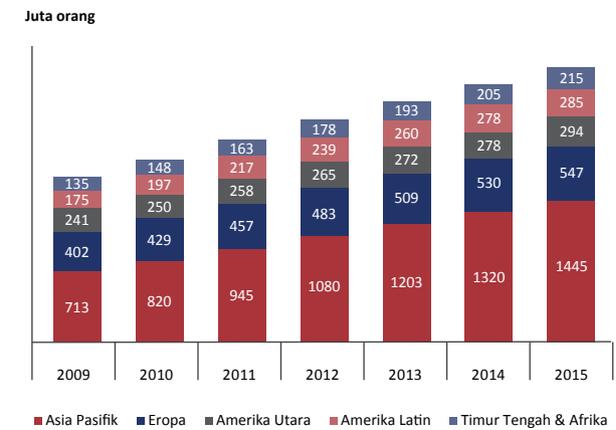
Beberapa risiko juga terdapat pada implementasi kebijakan reformasi struktural. Implementasi reformasi struktural yang tidak sesuai dengan rancangan awal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) dapat berdampak pada pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pelaksanaan proyek infrastruktur khususnya yang membutuhkan banyak impor berpotensi menyebabkan semakin dalam defisit transaksi berjalan sejalan dengan masih terbatasnya kapasitas domestik. Hal ini pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Masih terkait dengan kinerja transaksi berjalan dan reformasi struktural, risiko hilirisasi di sektor pertambangan yang tidak berjalan optimal dapat memperlemah keseimbangan eksternal perekonomian akibat tidak terealisasinya potensi maksimal kontribusi ekspor produk-produk tambang yang sudah diolah. Apabila implementasi dari berbagai program dan kebijakan yang sudah dicanangkan tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan maka semakin besar risiko pertumbuhan ekonomi untuk tidak mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko tersebut, implementasi reformasi struktural menjadi kunci agar perekonomian dapat tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Ekonomi digital (*digital economy*) menjadi salah satu isu yang hangat akhir-akhir ini, baik di Indonesia maupun dunia. Ekonomi digital sendiri didefinisikan sebagai “*the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange*” (Hartman, 2000). Konsep tentang ekonomi digital pada awalnya terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, infrastruktur pendukung, yang antara lain mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), telekomunikasi, jaringan, dan sebagainya. Kedua, *e-business*, yaitu bagaimana proses bisnis dilakukan; mencakup setiap proses yang organisasi lakukan dengan mediasi jaringan komputer. Ketiga, *e-commerce*, yaitu bagaimana proses transfer barang dan jasa juga dilakukan dengan mediasi jaringan komputer (Mesenbourg, 2001).

Seiring dengan perkembangannya yang sangat cepat, konsep tentang ekonomi digital sudah sedemikian bervariasi dan merambah banyak sektor dalam ekonomi. Implikasinya tidak hanya di bidang *Information and Communication Technology* (ICT), namun juga ke sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi, keuangan, dan kesehatan. Pada sektor retail, yang paling klasik adalah mengenai konsep *e-commerce*. Pada sektor transportasi, kemudian dikembangkan konsep *e-ticket* bahkan sampai pada *automated vehicles* pada moda-moda transportasi massal. Pada sektor pendidikanpun sudah mulai banyak diadopsi mengenai konsep *open online course* yang pada awalnya diinisiasi oleh University of Harvard dan MIT. Buku-buku dan jurnalpun saat ini banyak diperjualbelikan tidak hanya melalui jaringan internet, namun juga dalam bentuk elektronik (*soft file*). Pada sektor kesehatan konsep tentang ekonomi digital juga sudah sedemikian banyak diadopsi. Hal itu antara lain terlihat pada adanya *electronic record* ataupun diagnosa-diagnosa kedokteran yang disajikan dalam angka-angka dan grafik di layar monitor.

Perkembangan ekonomi digital di dunia sedemikian pesatnya yang tergambar pada beberapa indikator. Nilai investasi dalam bidang telekomunikasi cukup tinggi dan dalam tren yang masih terus meningkat. OECD (2015) mencatat bahwa nilai investasi bidang telekomunikasi di dunia sejak tahun 2000 mencapai rata-rata 200 miliar dolar AS per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, total sambungan telekomunikasi yang terdiri dari telepon analog, digital (ISDN dan DSL), modem, serat fiber, dan

Grafik 1. Jumlah Pengguna Internet

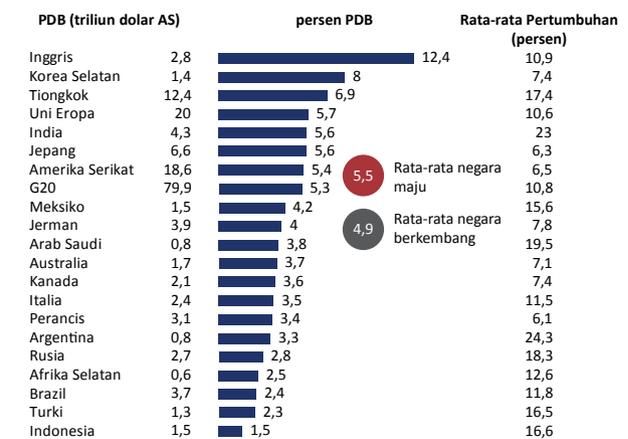


Sumber: emarketer

seluler mencapai sekitar 2,1 miliar sambungan pada 2013. Sambungan telepon analog tetap (*fixed*) menunjukkan penurunan sejak 2001, dimana hal ini menandakan bahwa preferensi masyarakat dunia terhadap telepon *mobile* semakin tinggi. Jumlah pengguna internet juga makin bertambah dan akan terus bertambah, terutama di Asia (Grafik 1). Ekonomi digital berbasis internet di 2016 diperkirakan mencapai 5,5% PDB di negara-negara maju G20 dan mencapai 4,9% PDB di negara berkembang G20 (Grafik 2).

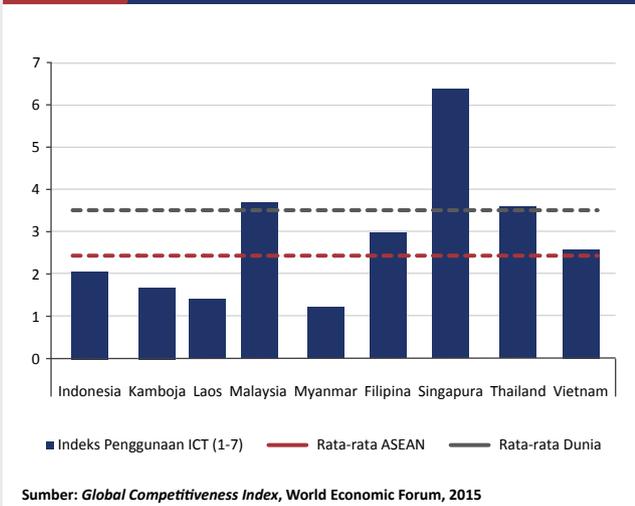
Dalam konteks individual, negara-negara juga berlomba-lomba mengembangkan ekonomi digital. Sebagai contoh,

Grafik 2. Perkembangan Pangsa PDB Internet



Sumber: Boston Consulting Group, 2012

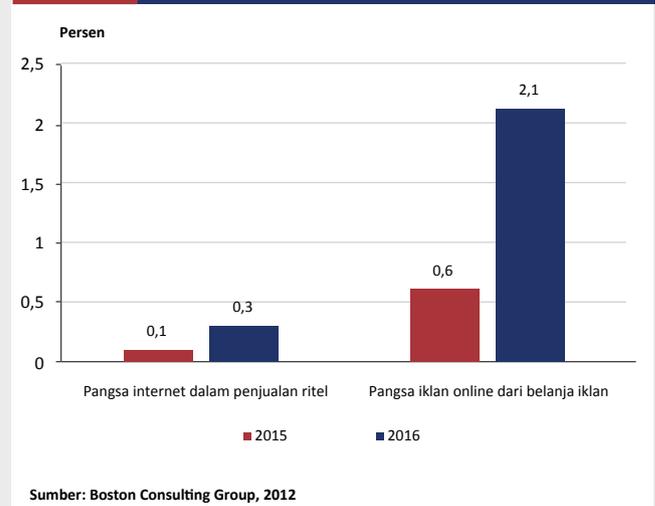
Grafik 3. Indeks Penggunaan ICT 2015



Tiongkok sudah meluncurkan *Five Year Plan for the Development of e-Commerce* pada tahun 2011. Dalam waktu tiga tahun, volume transaksi bisnis *e-commerce* Tiongkok sudah mencapai 10,1% dari total penjualan ritel. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital relatif tertinggal yang diindikasikan oleh relatif rendahnya indeks penggunaan ICT dibandingkan dengan rata-rata dunia dan ASEAN (Grafik 3). Namun demikian, percepatan proyek infrastruktur di bidang ICT diperkirakan mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia menjadi makin pesat sejalan dengan pasar yang cukup luas. Dampak dari penggunaan teknologi digital, khususnya internet diperkirakan meningkat dari 0,1% di 2010 menjadi 0,3% terhadap total penjualan di 2016. Pembelian dengan metode *Research Online Purchase Offline* (ROPO) yang berarti pembeli melakukan pemilihan barang lewat media *online* dan membelinya secara *offline* rata-rata sekitar 16 dollar AS per pengguna *online*. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas belanja *online*, pengeluaran untuk iklan *online* juga diperkirakan meningkat dari sekitar 0,6% dari total belanja iklan di 2010 menjadi 2,1% di 2016 (BCG, 2012).

Perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat ini didorong oleh dampak positif dari penerapannya. OECD (2014) menunjukkan industri yang bergerak di bidang teknologi informasi di negara OECD mempunyai produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan produktivitas keseluruhan perekonomian (Grafik 5). Hal ini menunjukkan penerapan teknologi digital akan meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Data OECD juga menunjukkan resiliensi pendapatan 250 perusahaan ICT *top players* pada saat diterpa krisis keuangan dunia. Pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut memang

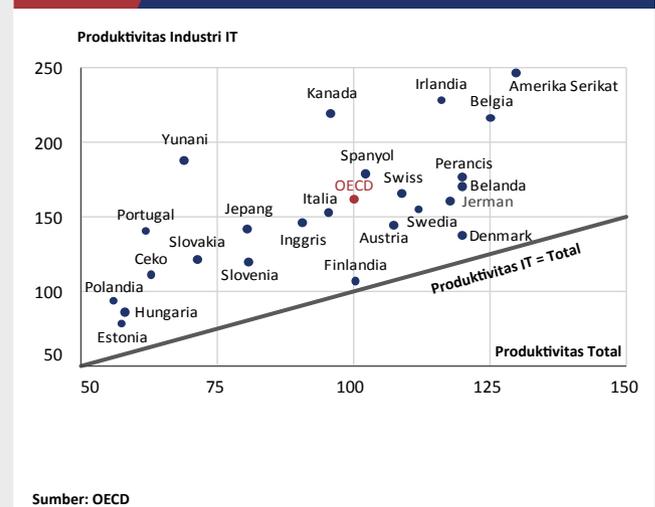
Grafik 4. Dampak e-Commerce di Indonesia



menurun, namun dengan cepat kembali meningkat. Kajian dari World Bank juga menunjukkan setiap penambahan 10 mobile telephone per 100 orang akan meningkatkan PDB sekitar 0,8% di negara-negara berkembang.

Disamping membuat perekonomian lebih efisien, penerapan ekonomi digital memberikan konsekuensi *the process of creative destruction* (Joseph Schumpeter) dimana teknologi berbisnis sebelumnya menjadi usang. Sebagai contoh perkembangan terkini di Indonesia adalah persaingan antara layanan transportasi konvensional dengan layanan yang memanfaatkan teknologi digital, demikian juga persaingan antara toko konvensional dengan toko daring. Dengan berbagai keunggulannya, teknologi digital secara perlahan akan menggantikan cara berbisnis konvensional. Dalam proses transisi ini, terdapat

Grafik 5. Produktivitas Sektor IT OECD



potensi adanya dampak negatif terhadap perekonomian. Di satu sisi, penerapan teknologi digital meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi sehingga pelanggan secara umum akan *better off*. Di sisi lain, cara berbisnis secara konvensional pada umumnya menyerap tenaga kerja lebih banyak. Penerapan teknologi digital berpotensi menggantikan bisnis konvensional sehingga dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini diperlukan kebijakan Pemerintah untuk memastikan perkembangan ekonomi digital berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan.

Dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital, Pemerintah menyiapkan *roadmap e-commerce*. Selain berdampak pada ekonomi, perkembangan ekonomi digital juga melahirkan berbagai tantangan diberbagai aspek seperti masalah keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen. Di tahun 2016, pemerintah akan menyusun peta jalan e-commerce dengan penekanan pada 7 isu strategis yaitu : (i) Logistik; (ii) Pendanaan; (iii) Perlindungan konsumen; (iv) Infrastruktur komunikasi; (v) Pajak; (vi) Pendidikan dan sumber daya manusia; dan (vii) *Cyber security*.

